RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

WILAYAH V

2025-2029

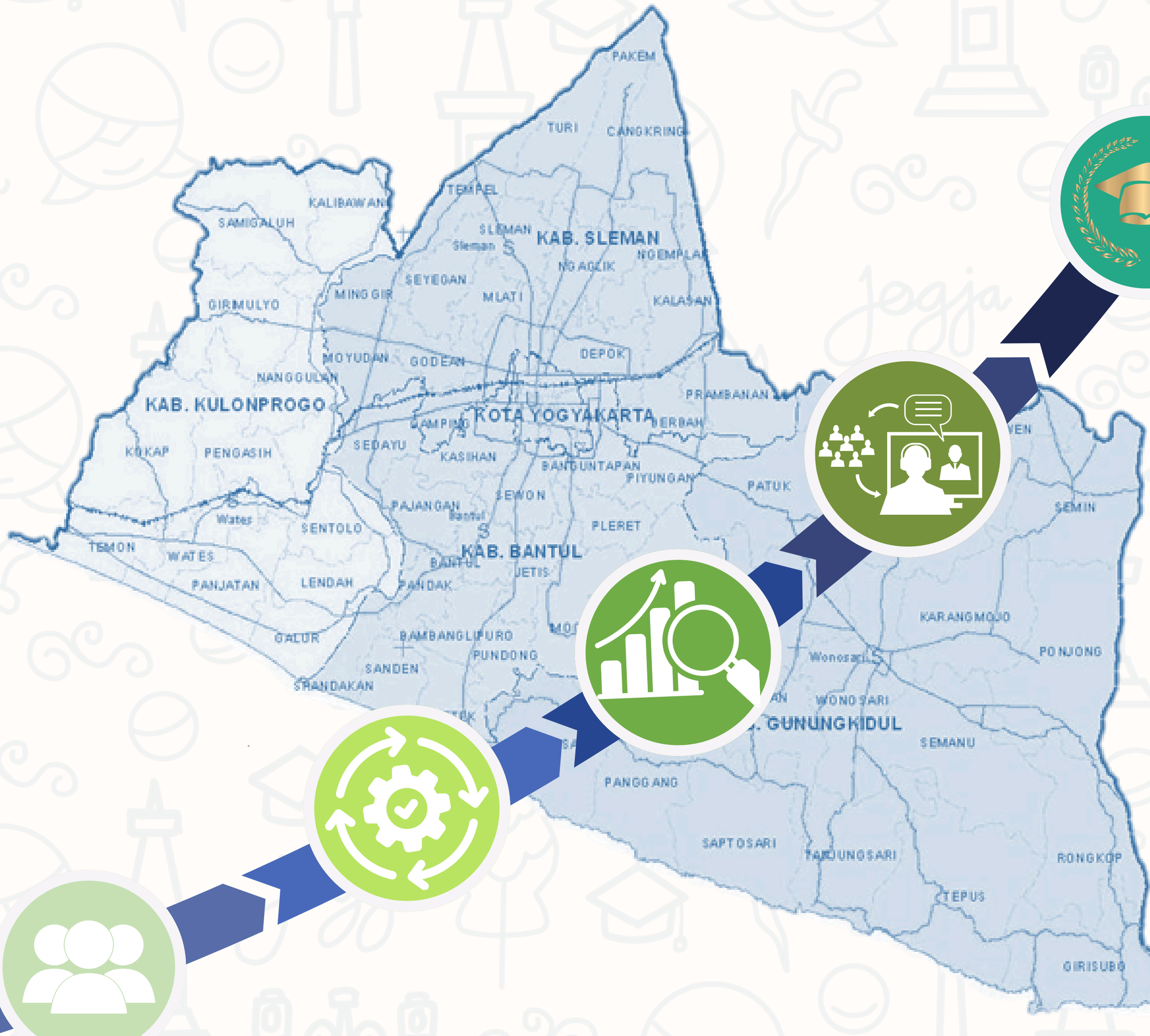

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V

Jalan Tentara Pelajar Nomor 13 Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi arah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah V selama periode 2025–2029, sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, Visi Indonesia Emas 2045, dan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. LLDIKTI Wilayah V berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai institusi yang bersih dan melayani dalam mewujudkan pendidikan tinggi Yogyakarta yang unggul, kolaboratif, inklusif, adaptif, dan berdampak.

Dokumen ini disusun dengan memperhatikan capaian kinerja periode sebelumnya, dinamika kebijakan pendidikan tinggi, serta berbagai tantangan dan peluang pengembangan perguruan tinggi swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran LLDIKTI Wilayah V dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terarah, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen renstra ini dapat memberikan manfaat nyata dalam penguatan mutu pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Yogyakarta, 10 Februari 2026
Kepala LLDIKTI Wilayah V

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH V

Setyabudi Indartono
NIP. 197207202003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I - PENDAHULUAN 1
1.1. Kondisi Umum 2
1.2. Potensi dan Permasalahan 16
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 21
2.1. Visi 25
2.2. Misi 29
2.3. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan 29
2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 31
BAB III - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 34
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian 35
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi LLDIK TI Wilayah V 37
3.3. Kerangka Regulasi 40
3.4. Kerangka Kelembagaan 43
BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 44
4.1. Target Kinerja 44
4.2. Kerangka Pendanaan 46
BAB V – PENUTUP 47
LAMPIRAN 48
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan 48
Lampiran 2. Definisi Operasional 52
Lampiran 3. Pohon Kinerja 61

BAB I - PENDAHULUAN

Periode 2025–2029 merupakan tahapan krusial dalam penguatan fondasi transformasi pembangunan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2025–2045. Visi ini menargetkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi yang berdaulat, adil, makmur, dengan lima indikator utama: peningkatan pendapatan per kapita, penurunan ketimpangan, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), peningkatan peran global, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Renstra Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan menegaskan arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang terintegrasi secara kuat dengan agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) 2025–2029, menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan SDM unggul dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan dua dari delapan misi utama RPJP Nasional. Hal ini menjadi dasar penguatan peran strategis Kemdiktisaintek dalam menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berdaya saing, memperkuat kapasitas riset dan inovasi nasional, serta mengarahkan transformasi berbasis pengetahuan menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Dalam menghadapi era global yang penuh disrupsi ditandai oleh percepatan transformasi digital, transisi menuju ekonomi hijau, serta perubahan geopolitik dan sosial-ekologis, Indonesia dituntut untuk menyiapkan SDM unggul, baik dalam aspek pengetahuan, keahlian, maupun karakter, memperkuat sistem Pendidikan tinggi yang adaptif, serta mengembangkan ekosistem riset dan inovasi yang berdampak.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Renstra LLDIKTI Wilayah V disusun dengan mengacu pada Renstra Kemdiktisaintek yang menjadi pedoman dan arah pembangunan dalam bidang pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan yang hendak dicapai pada periode 2025-2029. Lembaga layanan pendidikan tinggi berperan strategis dalam mendukung implementasi pembangunan SDM Unggul melalui fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan tinggi di Yogyakarta yang unggul, kolaboratif, inklusif, adaptif dan berdampak. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan capaian akademik, tetapi juga berkontribusi dan berdampak nyata terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1.1. Kondisi Umum

LLDIKTI Wilayah V merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). LLDIKTI terbentuk dengan diundangkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 April 2018. LLDIKTI merupakan transformasi dari Koordinasi Perguruan Tinggi (Kopertis) yang sudah terbentuk sejak tahun 1968 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di DIY pada akhir tahun 2024 berjumlah 100 PTS yang terdiri dari 30 Universitas, 6 Institut, 31 Sekolah Tinggi, 22 Akademi, 10 Politeknik, dan 1 Akademi Komunitas. Sedangkan jumlah program studi sebanyak 761 prodi, dan 194.021 mahasiswa aktif. (sumber: data internal LLDIKTI V Desember 2024). Renstra LLDIKTI Wilayah V periode 2020-2024 memiliki 4 Sasaran Kinerja dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penghitungan IKU LLDIKTI Wilayah V awalnya mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sehingga terjadi perubahan target IKU LLDIKTI Wilayah V yang disesuaikan dengan variabel dan indikator kinerja yang baru.

Pada periode 2020-2024 LLDIKTI Wilayah V telah menunjukkan capaian kinerja yang baik dengan keberhasilan dalam meningkatkan mutu layanan, mendukung implementasi kebijakan nasional, serta memperkuat tata kelola organisasi. Namun, sejumlah aspirasi publik masih membutuhkan tindak lanjut, antara lain peningkatan kapasitas PTS dalam implementasi kebijakan pendidikan tinggi, penyempurnaan sistem pendataan dan pelaporan, percepatan layanan kepegawaian dan kelembagaan, serta penguatan ekosistem mutu dan integritas di lingkungan PTS.

Berikut capaian kinerja 9 (sembilan) IKU LLDIKTI Wilayah V di tahun 2024:

No	Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian	Persentase Capaian
SK 1	**Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)**				
IKU 1.1	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	%	88,9	91,24	102,63
IKU 1.2	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	96,03	95	98,93
SK 2	**Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi**				
IKU 2.1	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	25	38	152
IKU 2.2	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PT yang: menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	1,15	2,85	247,83
IKU 2.3	Persentase PTS yang Mengimplementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	40	54	135
SK 3	**Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan**				
IKU 3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.	%	70	61	87,14
IKU 3.2	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	45	14	31,11
SK 4	**Meningkatnya tata kelola LLDIKTI**				
IKK 4.1	Predikat SAKIP Satker	Predikat	A (80-90)	A (90)	100
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	96,2	99,72	103,66

Tabel 1 Capaian kinerja 9 (sembilan) IKU LLDIKTI Wilayah V di tahun 2024

1.1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Aspek pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama LLDIKTI Wilayah V untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan tinggi. LLDIKTI Wilayah V berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui sistem yang transparan, efisien, dan responsif. Peningkatan nilai SKM yang konsisten dari tahun 2023 hingga 2025 mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas pelayanan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1 Kepuasan Pengguna Layanan LLDIKTI Wilayah V menunjukkan kinerja yang terus membaik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan signifikan dari 40,5 pada tahun 2022 menjadi 88,82 pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 91,24 pada tahun 2024.

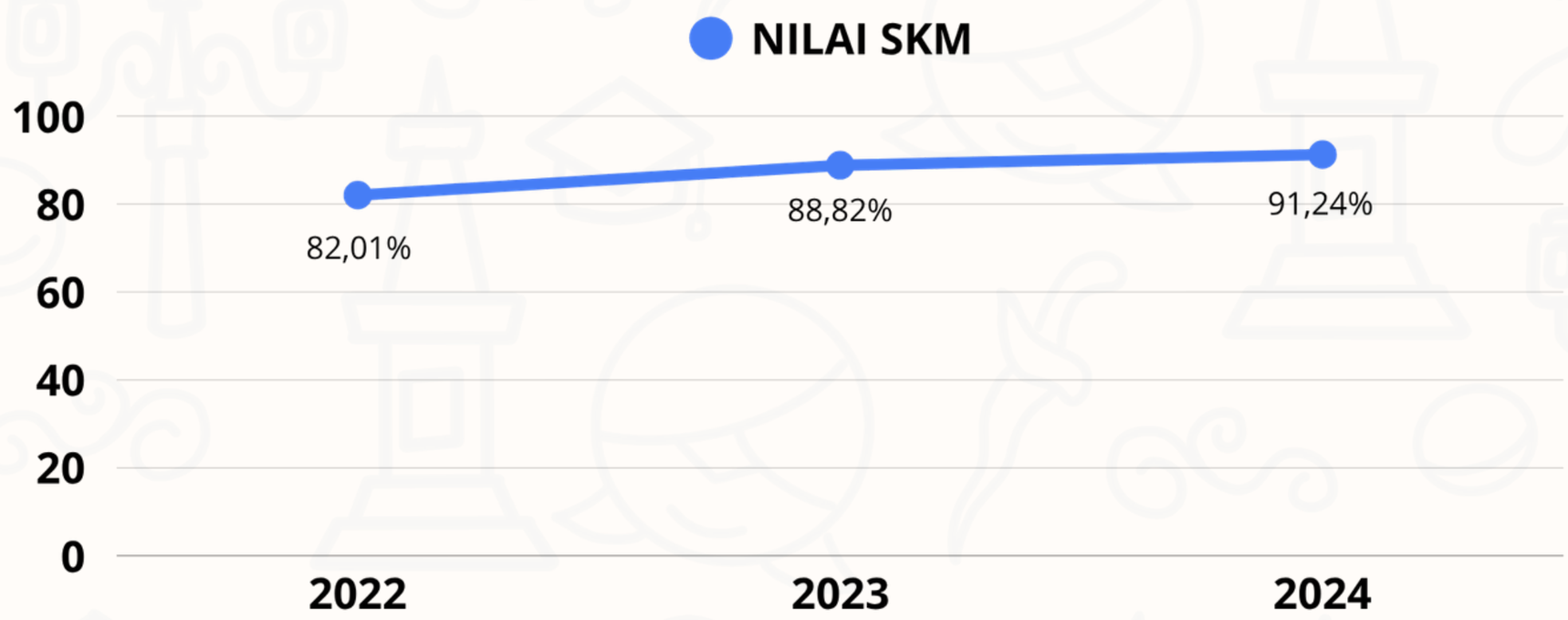

Diagram 1 Tren Capaian Nilai SKM Tahun 2022-2024

Peningkatan tersebut mencerminkan efektivitas upaya perbaikan kualitas layanan yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten di seluruh periode pengukuran. Stabilnya capaian IKM pada kategori sangat baik menunjukkan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi ekspektasi pengguna. Perkembangan jumlah dan keragaman PTS di DIY turut meningkatkan kebutuhan pembinaan mutu dan pendampingan regulasi. Pada 2024, LLDIKTI Wilayah V dengan jumlah pegawai sebanyak 55 orang membina 100 PTS dengan 760 program studi dan 194.021 mahasiswa aktif. Untuk itu, dalam Renstra, LLDIKTI Wilayah V akan terus berupaya mengoptimalkan sistem layanan daring dan luring, mempercepat proses administratif, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Fokus utama adalah memenuhi ekspektasi masyarakat, khususnya perguruan tinggi swasta dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memperhatikan masukan dan aspirasi yang dihimpun melalui berbagai saluran pengaduan/masukan. Hal ini akan mendukung terwujudnya tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pendidikan tinggi

1.1.2. Prersentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Selama periode 2020-2024, LLDIKTI Wilayah V telah gencar melakukan upaya untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan tinggi. Pencapaian mutu kelembagaan di LLDIKTI Wilayah V menunjukkan bahwa peningkatan akreditasi PTS masih menjadi tantangan besar. Meskipun realisasi target program Studi terakreditasi pada tahun 2024 sebesar 93,68% bisa melampaui target yang direncanakan sebesar 87%, akan tetapi berdasarkan evaluasi capaian IKU 1.1.2, persentase PTS yang memperoleh peringkat Akreditasi Unggul pada tahun 2023 baru mencapai 18,81%, lebih rendah dari target sebesar 23,53%. Sedangkan target PTS terakreditasi sebesar 98% hanya tercapai 94%. Walaupun terjadi peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, banyak PTS belum mampu memenuhi standar unggul karena keterbatasan sumber daya, kesiapan tata kelola, serta pemahaman yang belum merata terkait pentingnya akreditasi sebagai indikator mutu.

Upaya peningkatan mutu telah dilakukan melalui berbagai intervensi, termasuk program pembinaan, klinik akreditasi, dan pendampingan bagi PTS. Namun, sebagian PTS dengan kapasitas rendah masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi instrumen akreditasi, sehingga peningkatan mutu secara organik berjalan lambat. Dalam konteks ini, strategi penggabungan atau merger PTS menjadi salah satu alternatif yang mulai dipertimbangkan untuk mempercepat peningkatan mutu, terutama bagi PTS kecil atau berisiko tinggi yang sulit mencapai akreditasi unggul secara mandiri.

Adapun peningkatan kelembagaan hasil intervensi LLDIKTI Wilayah V selama periode 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Jumlah Perguruan Tinggi Swasta dan Program Studi

Tahun	Universitas	Institut	Sekolah Tinggi	Akademi	Politeknik	Akademi Komunitas	Total PTS
2020	23	6	36	28	8	1	102
2021	23	7	36	26	8	1	101
2022	25	7	35	24	9	1	101
2023	26	8	35	24	10	1	101
2024	30	6	35	22	10	1	100

Tabel 2 Jumlah Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI Wilayah V Tahun 2020-2024

Tahun	Universitas	Institut	Sekolah Tinggi	Akademi	Politeknik	Akademi Komunitas	Total Prodi
2020	440	38	120	34	25	3	660
2021	459	47	111	29	29	3	678
2022	480	50	110	29	30	3	702
2023	486	50	113	29	30	3	711
2024	541	34	115	27	38	5	760

Tabel 3 Jumlah Program Studi PTS LLDIKTI Wilayah V Tahun 2020-2024

2. Sebaran Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta dan Program Studi

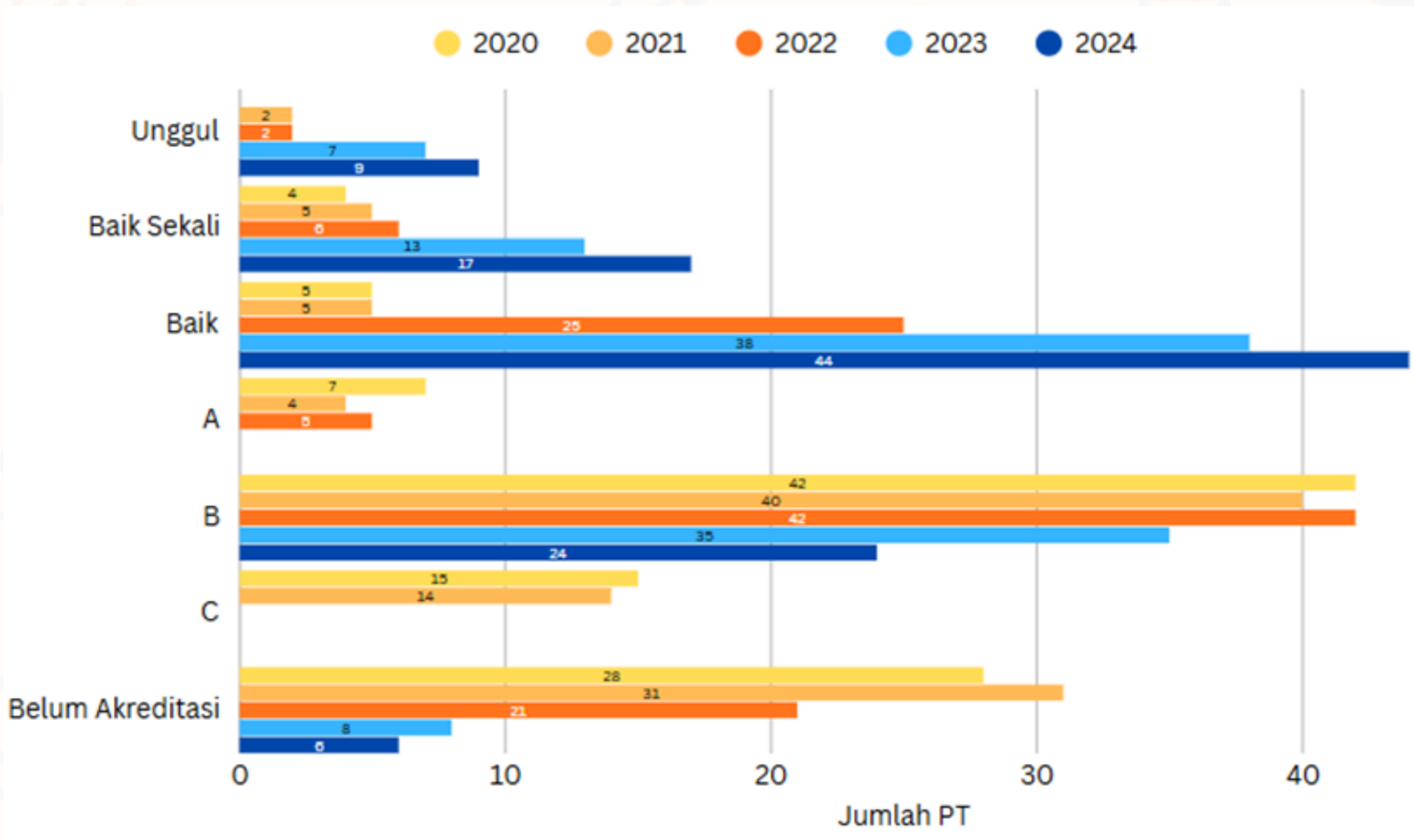

Diagram 2 Profil PTS DIY berdasarkan akreditasi

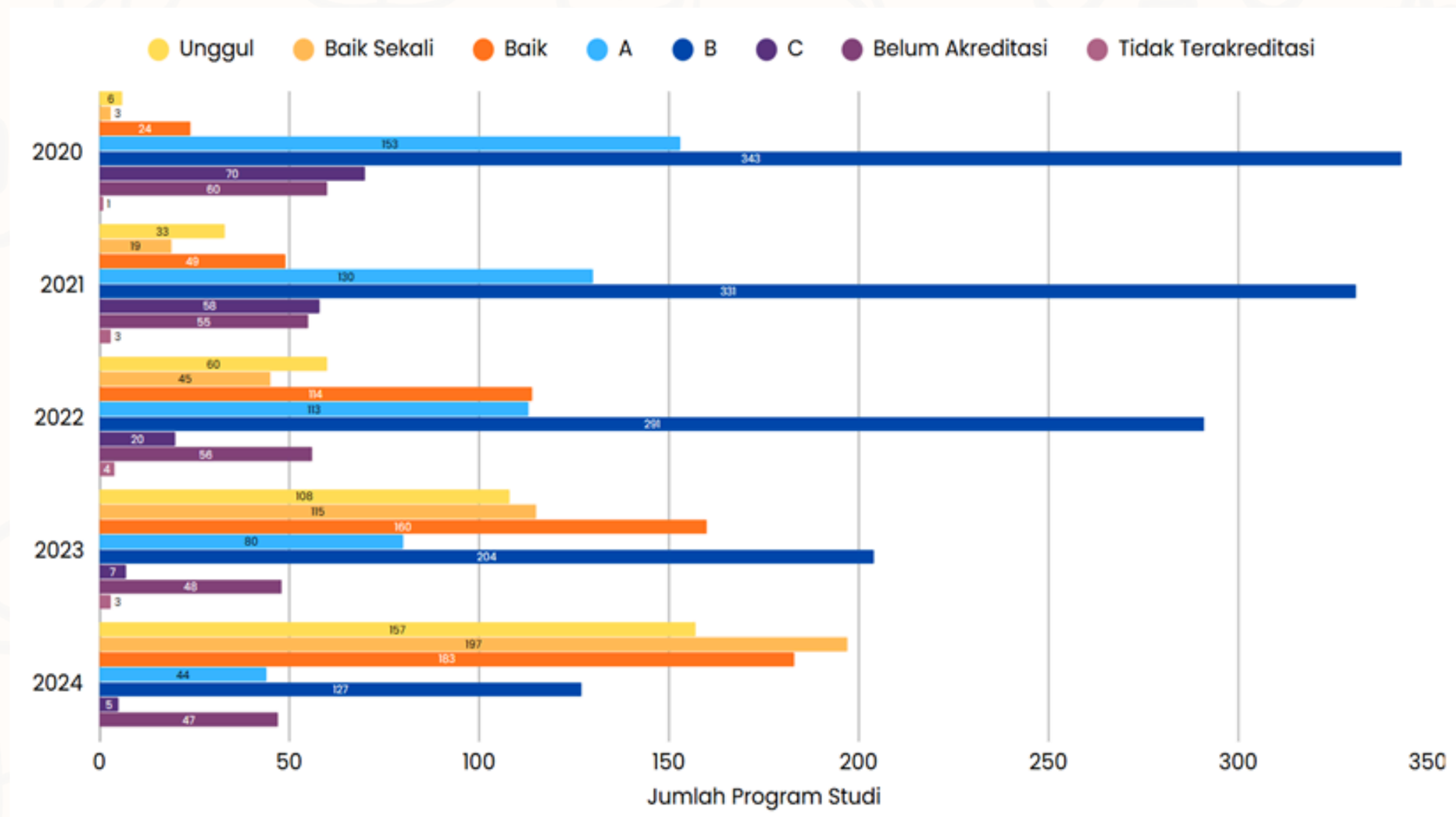

Diagram 3 Profil Program Studi PTS DIY berdasarkan akreditasi

2. Sebaran Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta dan Program Studi

Tahun	Penyatuan PTS	Penggabungan PTS	Perubahan Bentuk PTS	Pendirian PTS
2020	0	1	1	0
2021	0	0	4	1
2022	0	2	0	1
2023	0	0	0	1
2024	1	1	3	0

Tabel 4 Jumlah Perubahan Bentuk PTS LLDIKTI Wilayah V Tahun 2020-2024

1.1.3. Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Persentase Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi menunjukkan akselerasi yang kuat dari 10,87% di tahun 2020 menjadi 38% di tahun 2024. Progres ini menandakan adanya peningkatan komitmen administratif dan kelembagaan yang signifikan di PTS wilayah V dalam mengimplementasikan kerangka kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Intervensi LLDIKTI Wilayah V berupa sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan implementasi kurikulum telah berhasil mendorong PTS untuk secara formal menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi, seperti magang, pertukaran pelajar, KKN tematik, atau proyek independen.

LLDIKTI Wilayah V memastikan keberlanjutan dan kualitas implementasi pembelajaran di luar program studi, bukan sekadar kuantitas formalitas. Banyak PTS, terutama yang berskala kecil, masih menghadapi tantangan dalam ketersediaan jaringan mitra yang relevan dan kesulitan dalam konversi Sistem Kredit Semester (SKS) penuh 20 SKS. Oleh karena itu, strategi intervensi harus bergeser dari mendorong penyelenggaraan menjadi penguatan ekosistem MBKM, misalnya melalui fasilitasi hibah konsorsium MBKM antar-PTS dan pengembangan database mitra industri terstandarisasi untuk menjembatani kesenjangan akses tersebut.

Diagram 4 PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

1.1.4. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi muncul pada tahun 2023. Pada tahun 2020–2022, indikator masih bersifat terintegrasi antara aspek kelembagaan PTS dan partisipasi mahasiswa, dengan capaian meningkat dari 10,87% (2020) menjadi 12,87% (2021) dan 17,00% (2022). Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya implementasi awal kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan PTS serta meningkatnya komitmen institusi dalam menyediakan pembelajaran kontekstual berbasis pengalaman.

Sejak tahun 2023, terjadi perubahan formulasi indikator yang memisahkan antara indikator kinerja PTS dan indikator partisipasi mahasiswa. Pada indikator PTS, capaian meningkat dari 21,78% (2023) menjadi 38% (2024), menunjukkan penguatan kesiapan dan komitmen PTS dalam menyelenggarakan pembelajaran di luar program studi. Sementara itu, indikator mahasiswa mencatat capaian 1,08% (2023) dan meningkat menjadi 2,85% (2024), yang mengindikasikan adanya perbaikan partisipasi mahasiswa dan pendataan aktivitas MBKM, meskipun masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Evaluasi capaian ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Renstra berikutnya, khususnya untuk mendorong peningkatan keterlibatan mahasiswa, optimalisasi konversi SKS, serta penguatan tata kelola dan kualitas data.

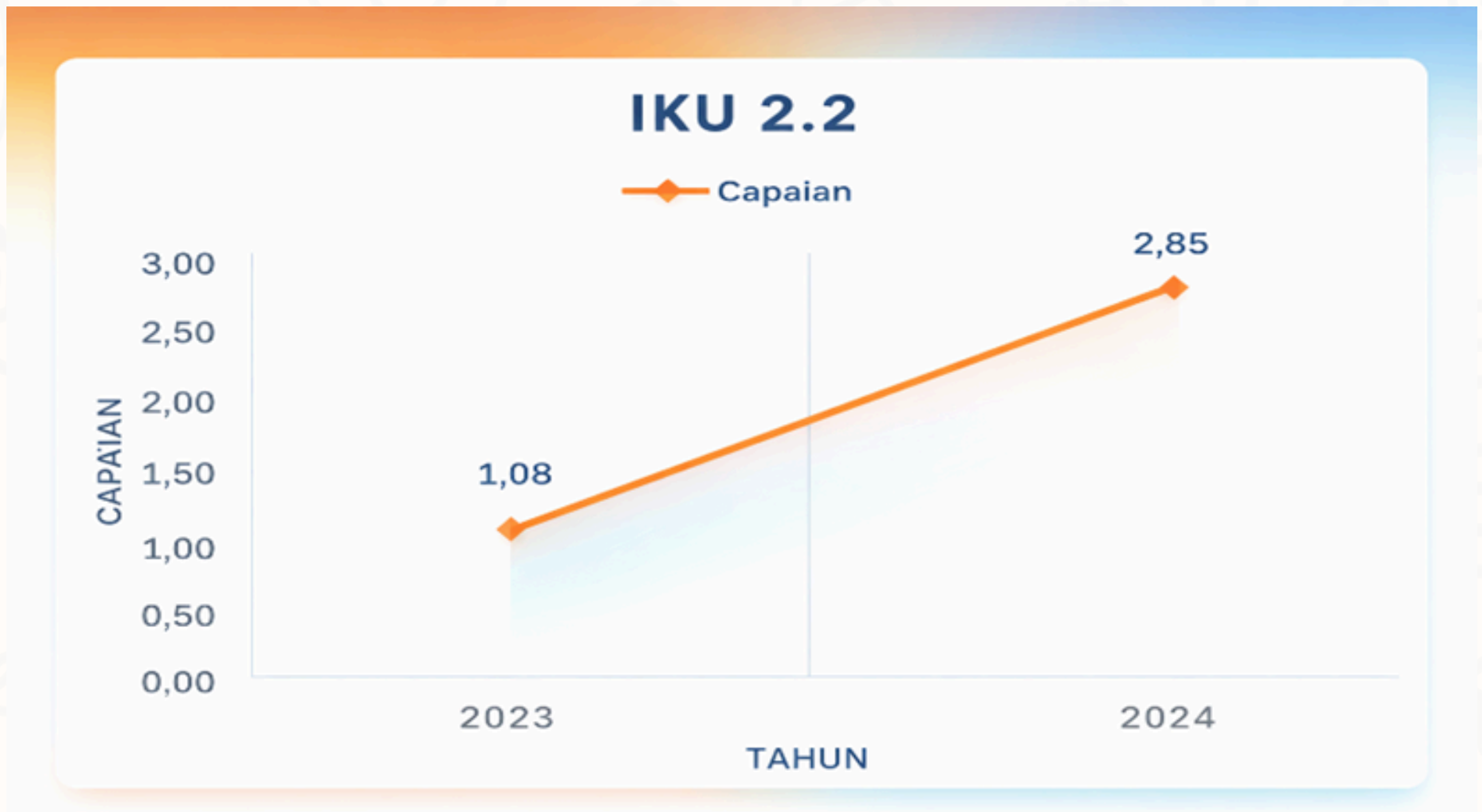

Diagram 5 Persentase mahasiswa menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

1.1.5. Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

LLDIKTI Wilayah V secara konsisten mendorong Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan budaya akademik yang aman, inklusif, dan berintegritas. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi regulasi, fasilitasi pembentukan kebijakan dan satuan tugas di tingkat perguruan tinggi, serta pendampingan pemenuhan instrumen kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa jumlah PTS yang mengimplementasikan kebijakan tersebut mengalami peningkatan secara bertahap sepanjang periode Renstra.

Secara konsisten, PTS yang mengimplementasi kebijakan ini terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 44,12%, tahun 2021 sebesar 53,47% dan tahun 2022 sebesar 59%. Kemudian pada tahun 2023 terjadi penambahan indikator sehingga harus dilakukan evaluasi terhadap ketercapaian indikator, di mana PTS yang memenuhi kriteria sebesar 31,68%. Meskipun seolah-olah turun, namun sebenarnya secara kualitas lebih baik karena indikator yang baru lebih menekankan pada peningkatan kualitas dan tata kelola. Kemudian pada tahun 2024, fasilitasi yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah V mampu menaikkan capaian menjadi 54%.

Capaian ini menunjukkan meningkatnya komitmen PTS dalam mengadopsi kebijakan pencegahan dan penanganan berbagai bentuk pelanggaran nilai akademik dan sosial. Meskipun demikian, evaluasi juga menunjukkan masih perlunya penguatan aspek implementasi substantif, kapasitas pengelola, serta keberlanjutan pelaporan dan monitoring. Capaian Renstra sebelumnya ini menjadi landasan penting bagi penyusunan Renstra selanjutnya, khususnya dalam memperkuat efektivitas kebijakan dan memastikan implementasinya berdampak nyata pada terciptanya lingkungan kampus yang aman, sehat, dan berintegritas.

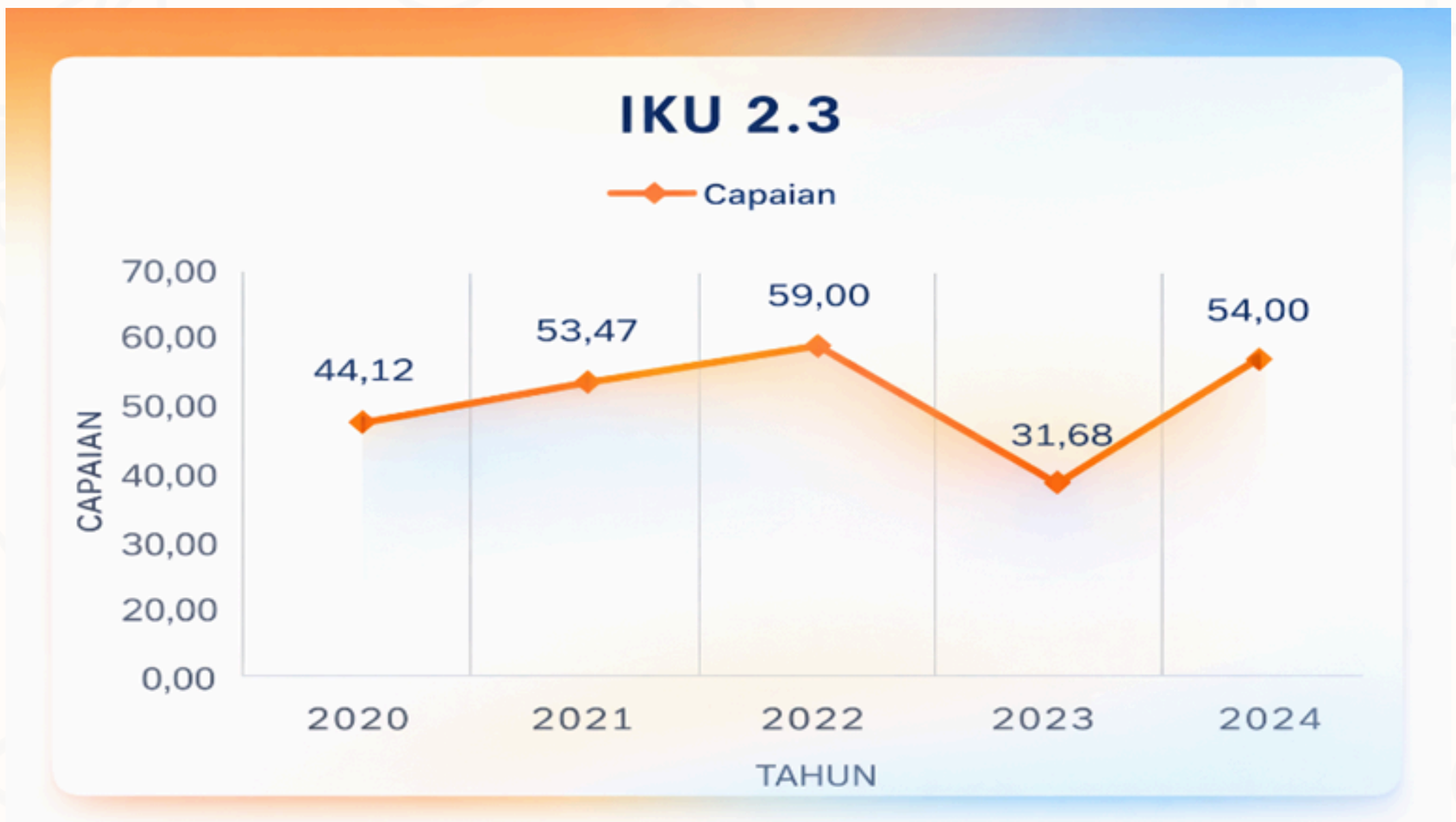

Diagram 6 Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

1.1.6. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus

Pada tahun 2023, capaian IKU 3.1 tercatat sebesar 57%, tepat sama dengan target yang ditetapkan LLDIKTI Wilayah V. Hal ini menunjukkan bahwa setengah lebih PTS telah memenuhi standar minimal kegiatan dosen di luar kampus. Capaian ini dinilai konsisten dengan perubahan indikator IKU yang berlaku di tahun 2023, sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) bahwa IKU tahun tersebut merupakan pecahan dari indikator sebelumnya dan menggunakan kriteria baru terkait dosen yang berkegiatan di luar kampus. Dengan demikian, pencapaian 57% dianggap sebagai baseline awal yang kuat bagi pengembangan indikator di tahun berikutnya.

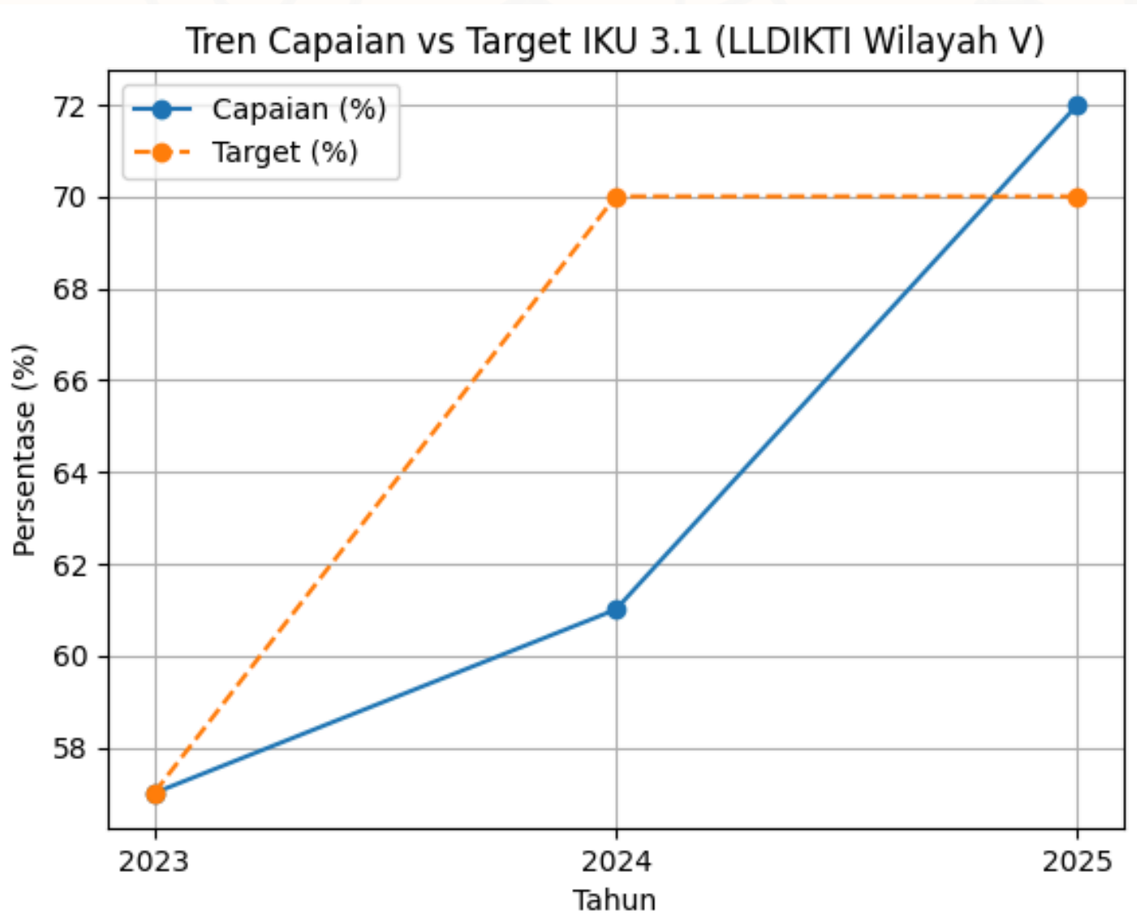

Diagram 7 Tren Capaian vs Target IKU 3.1 LLDIKTI Wilayah V

Namun demikian, pada tahun 2024, capaian IKU 3.1 menurun relatif terhadap target. LAKIN 2024 mencatat capaian sebesar 61%, sedangkan target LLDIKTI tahun 2024 adalah 70%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 9 poin persentase yang perlu menjadi perhatian. Meskipun secara absolut terdapat peningkatan dari 2023 ke 2024 (dari 57 PTS menjadi 61 PTS), pencapaian tersebut belum cukup untuk memenuhi target tahunan. Hal ini dapat dikaitkan dengan dinamika penerapan kriteria baru IKU 3.1, kapasitas pelaporan PTS yang belum merata, dan tantangan dalam pemenuhan bukti kegiatan dosen di luar kampus.

Pada tahun 2025, berdasarkan hasil pengolahan data IKU 3.1 dari PTS di wilayah LLDIKTI Wilayah V, diperoleh capaian sebesar 72%, atau 72 PTS. Capaian ini melampaui target 70 PTS, menunjukkan adanya penguatan kapasitas PTS dalam mendorong kegiatan dosen di luar kampus serta perbaikan dalam tata kelola pelaporan. Dengan meningkatnya jumlah PTS yang memenuhi kriteria IKU 3.1, terlihat bahwa sebagian besar perguruan tinggi telah mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kebijakan MBKM dan memperluas mitra eksternal untuk pelaksanaan tridharma.

1.1.7. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Dalam menghadapi dinamika dan tuntutan global, PTS di LLDIKTI Wilayah V telah menunjukkan peningkatan kinerja institusi melalui penguatan kerja sama program studi dengan berbagai mitra strategis, seperti sektor industri, instansi pemerintah, serta organisasi internasional.

Menurut tren pendataan dan pelaporan kerja sama PTS pada LAPORKERMA sesuai dengan gambar di bawah ini didapatkan peningkatan jumlah pendataan dan pelaporan naskah kerja sama PTS di LLDIKTI Wilayah V dalam per tahunnya dimana kondisi paling ideal pada tahun 2023 dengan jumlah pendataan naskah IA dan jumlah naskah MoA lebih besar dibanding jumlah naskah MoU. Hal ini menunjukkan implementasi kerja sama PTS yang lebih aktif.

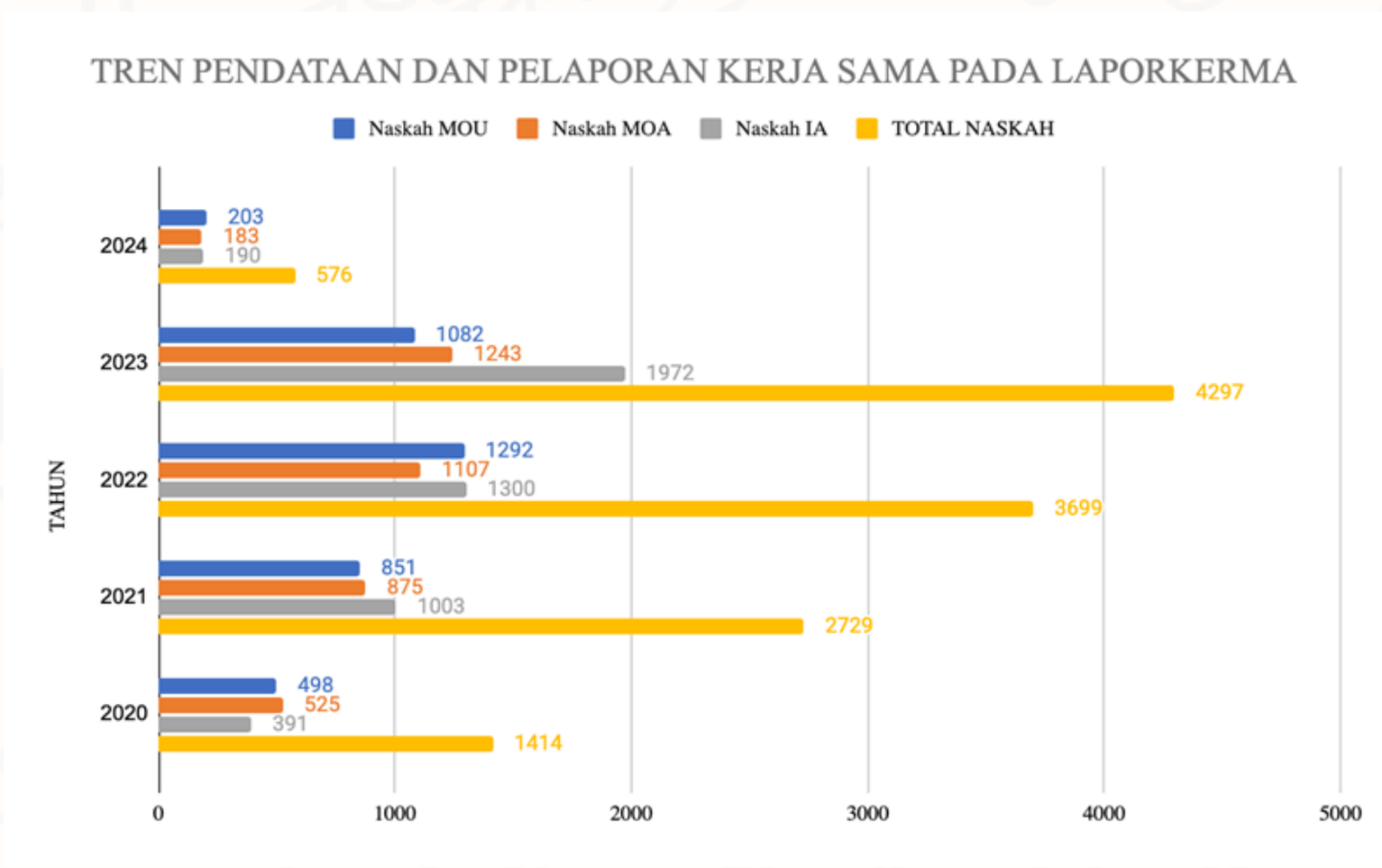

Diagram 8 Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Adapun PTS yang mendatakan dan melaporkan kerja sama pada LAPORKERMA pada tahun 2024 meningkat menjadi 75% yang sebelumnya pada tahun 2023 sejumlah 59% sesuai dengan gambar di bawah ini. Peningkatan tersebut tidak luput dari intervensi LLDIKTI Wilayah V berupa penyelenggaraan coaching clinic maupun bimtek pendataan dan pelaporan pada LAPORKERMA bagi pengelola kerja sama perguruan tinggi.

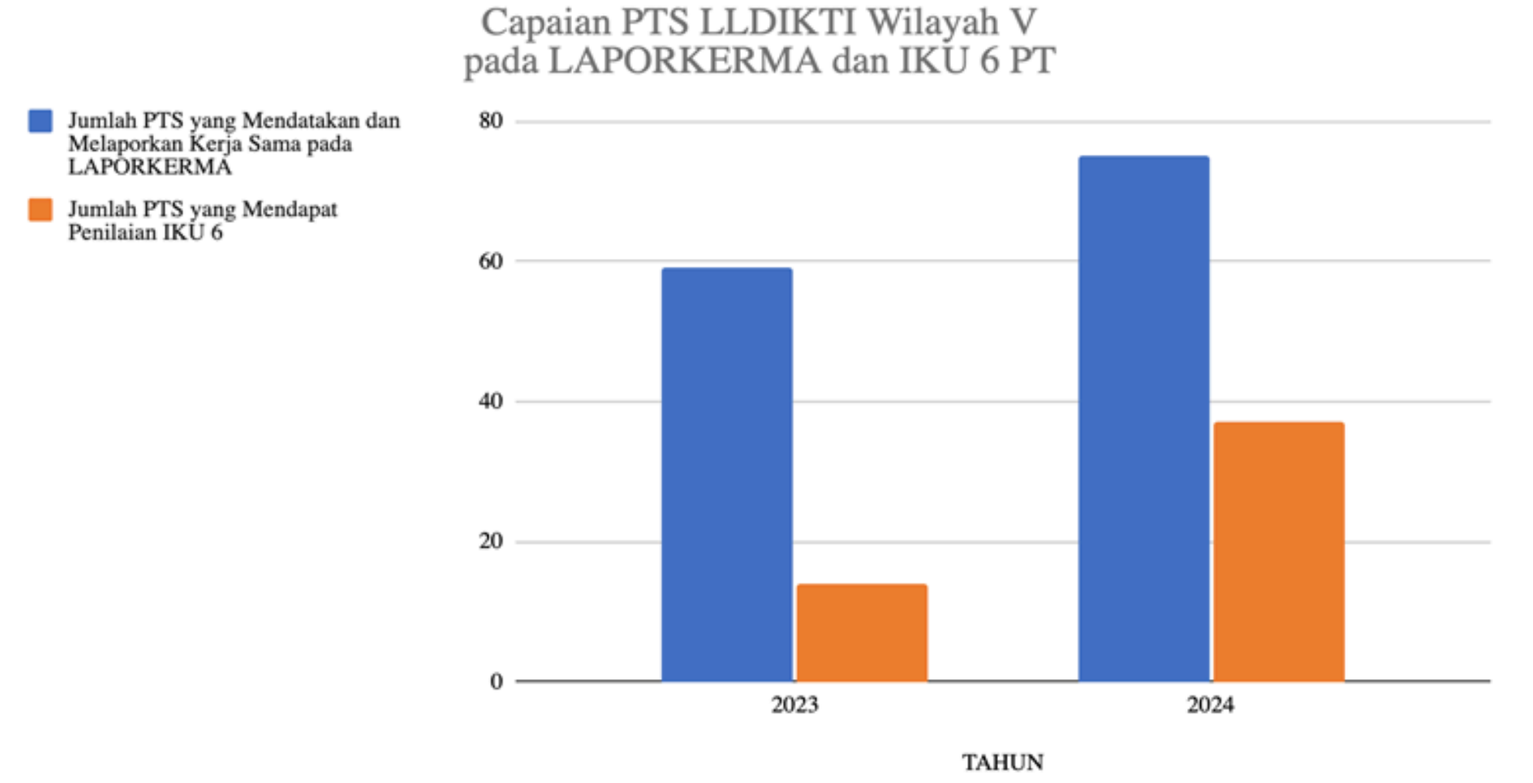

Diagram 9 Capaian PTS pada LAPORKERMA dan IKU 6 PT Tahun 2023-2024

Terkait capaian IKU, data menunjukkan pada IKU tahun 2022, sejumlah 20 PTS di LLDIKTI Wilayah V terverifikasi mendapat penilaian IKU 6 Perguruan Tinggi sehingga capaian IKU 3.2 LLDIKTI Wilayah V sebesar 20%. Capaian tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan LLDIKTI Wilayah V sebesar 20%.

Namun pada IKU tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 14 PTS yang terverifikasi penilaian IKU 6 Perguruan Tinggi sehingga capaian IKU 3.2 LLDIKTI Wilayah V sebesar 14% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 45%. Salah satu faktor kendala adalah perubahan aturan pada formula penilaian IKU 6 Perguruan Tinggi yang menyebabkan kurang tersosialisasinya aturan kepada PTS. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan PTS di LLDIKTI Wilayah V yang terverifikasi mendapat penilaian IKU 6 Perguruan Tinggi sejumlah 37 PTS sehingga capaian IKU 3.2 LLDIKTI Wilayah V sebesar 37% sedangkan target sebesar 45%.

1.1.8. Predikat SAKIP Satker

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014). Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (1) rencana strategis, (2) perjanjian kinerja, (3) pengukuran kinerja, (4) pengelolaan data kinerja, (5) pelaporan kinerja, (6) reviu dan evaluasi capaian kinerja. Pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Metode evaluasi AKIP di tahun 2024 menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) yang meliputi lima komponen sebagai berikut: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dari hasil KKE akan diperoleh skor nilai evaluasi AKIP, nilai ini mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negeri.

Predikat SAKIP									
2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
BB (>70-80)	B (65,53)	BB (>70-80)	BB (74,73)	BB (80)	A (87)	A (>80-90)	A (87,60)	A (>80-90)	A (90)
% Capaian		% Capaian		% Capaian		% Capaian		% Capaian	
93,61%		100%		108,75%		100%		100%	

Tabel 5 Predikat SAKIP LLDIKTI Wilayah V Tahun 2020-2024

Di lingkungan Kemendikbudristek, Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil Evaluasi AKIP Mandiri yang dilakukan unit pelaksana teknis. Kemudian hasilnya di evaluasi Kembali oleh Inspektorat Jenderal. Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja di LLDIKTI V mendapatkan Predikat "A" dengan interpretasi "Memuaskan". Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk IKK 4.1 telah mencapai target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan nilai sebesar 87,6 capaian di 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,4 poin menjadi 90. Target akhir periode Renstra telah mencapai target nilai A dengan nilai maksimal sebesar 90 poin.

1.1.9. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Berdasarkan capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L tahun 2020–2024, kinerja anggaran LLDIKTI Wilayah V menunjukkan hasil yang baik dan cenderung meningkat secara positif. Pada tahun 2020, realisasi nilai kinerja anggaran mencapai 93,98 dari target 80, sehingga persentase capaiannya sebesar 117,48%. Pada tahun 2021, target meningkat menjadi 94 dengan realisasi sebesar 91,45 atau mencapai 97,29% dari target. Selanjutnya, pada tahun 2022, dari target 94,5 diperoleh realisasi 92,23 dengan persentase capaian sebesar 97,59%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun target semakin meningkat, capaian kinerja anggaran tetap dapat dipertahankan pada level yang tinggi. Pada tahun 2023, kinerja anggaran kembali melampaui target, yaitu dengan realisasi 96,17 dari target 95 atau sebesar 101,24%. Pencapaian tersebut semakin menguat pada tahun 2024, ketika realisasi mencapai 99,72 dari target 96,20, dengan tingkat capaian sebesar 103,66%.

IKK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L									
2020		**2021**		**2022**		**2023**		**2024**	
Target	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**	**Target**	**Realisasi**
80	**93,98**	94	**91,45**	**94,5**	**92,23**	**95**	**96,17**	**96,2**	**99,72**
% Capaian		% Capaian		% Capaian		% Capaian		% Capaian	
117,48%		**97,29%**		**97,59%**		**101,24%**		**103,66%**	

Tabel 6 Capaian IKK 4.2

Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran LLDIKTI Wilayah V selama periode 2020–2024 telah dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan akuntabel. Walaupun pada tahun 2021 dan 2022 realisasi belum sepenuhnya melampaui target, tingkat capaiannya tetap berada pada kategori sangat baik dan menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tetap terkendali. Perbaikan capaian pada tahun 2023 dan 2024 juga mengindikasikan adanya peningkatan kualitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L LLDIKTI Wilayah V dapat dinilai semakin baik dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program dan peningkatan kualitas layanan lembaga.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia dan Visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah V untuk melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka LLDIKTI Wilayah V berkomitmen untuk menjadi institusi yang bersih dan melayani dalam mewujudkan pendidikan tinggi Yogyakarta yang unggul, kolaboratif, inklusif, Adaptif dan berdampak. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, LLDIKTI Wilayah V melakukan analisis menggunakan metode SWOT yaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dengan hasil sebagai berikut:

1.2.1. Permasalahan

Kelemahan (Weakness)

LLDIKTI Wilayah V masih menghadapi sejumlah kelemahan internal yang perlu menjadi perhatian dalam mendukung pencapaian sasaran strategis periode 2025–2029. Kelemahan tersebut antara lain belum meratanya kapasitas dan kompetensi SDM yang menyebabkan adanya gap kompetensi antar pegawai, adanya keterbatasan kompetensi pegawai yang menangani substansi peningkatan mutu pendidikan tinggi pemahaman di bidang pengembangan kurikulum, instrumen akreditasi, kajian kelembagaan, dan bidang kerjasama berupa negosiasi bisnis dan industrial engagement untuk penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Selain itu juga terdapat keterbatasan kapasitas SDM pada kemampuan teknis untuk pengolahan dan analitis data serta pemanfaatan teknologi informasi.

Dari sisi tata kelola teknologi dan informasi, beberapa teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah V belum tersedia, diantaranya dashboard pemantauan kesiapan akreditasi program studi dan institusi dan sistem informasi internal yang terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Selain itu integrasi data lintas sistem belum sepenuhnya kuat sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan angka/versi data yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Kesiapan implementasi SPBE dan dukungan teknologi informasi juga belum merata, ditandai dengan belum optimalnya penerapan sistem layanan terpadu, single sign-on, serta masih adanya ketergantungan pada proses manual.

Selanjutnya kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penguatan kapasitas SDM, transformasi digital yang terintegrasi, serta konsolidasi tata kelola berbasis data dan risiko agar pelaksanaan Renstra LLDIKTI Wilayah V dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan terukur.

Ancaman (*Threat*)

LLDIKTI Wilayah V menghadapi sejumlah ancaman eksternal yang perlu dimitigasi secara komprehensif dalam pelaksanaan Renstra 2025–2029. Ancaman eksternal tersebut diantaranya perubahan regulasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang cepat dapat menghambat kesiapan LLDIKTI Wilayah V dalam memberikan fasilitasi kepada PTS. Ketidaksiapan PTS dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan baru juga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian tata kelola dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah V perlu memperkuat peran fasilitasi, pendampingan, dan diseminasi kebijakan secara sistematis untuk mendukung transisi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, ketergantungan terhadap kualitas pelaporan data dari perguruan tinggi swasta yang masih bervariasi berisiko menimbulkan ketidaksinkronan data, menghambat pemantauan capaian kinerja, dan mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan. Ancaman juga muncul dari kesenjangan kapasitas dan tata kelola antar-PTS, meningkatnya permasalahan kelembagaan seperti konflik internal, dualisme, maupun ketidaksesuaian administrasi, yang berpotensi mengganggu stabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, penguatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan industri, juga menghadapi risiko rendahnya keberlanjutan program serta kecenderungan kerja sama yang berhenti pada dokumen tanpa implementasi nyata. Pada saat yang sama, transformasi layanan digital menghadapi ancaman keamanan informasi dan stabilitas layanan akibat risiko serangan siber, keterbatasan kendali atas sistem pusat nasional, serta tingginya ekspektasi publik terhadap layanan cepat dan transparan. Tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya risiko disinformasi dan dinamika komunikasi publik di ruang digital yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

Keseluruhan ancaman tersebut menegaskan pentingnya penguatan mitigasi risiko, konsolidasi tata kelola berbasis data, peningkatan ketahanan layanan digital, serta penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar kinerja LLDIKTI Wilayah V tetap adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

1.2.2. Potensi

Kekuatan (Strength)

Kekuatan (Strength)

Sebagai upaya menghadapi berbagai tantangan strategis penyelenggaraan pendidikan tinggi di DIY, LLDIKTI Wilayah V memiliki sejumlah potensi internal yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat kinerja fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada periode 2025–2029. LLDIKTI Wilayah V memiliki komposisi dan kapasitas SDM yang kuat dan berpengalaman serta berintegritas dalam memberikan layanan dan fasilitasi peningkatan mutu Perguruan tinggi. Capaian reformasi birokrasi dengan Perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan peningkatan kepuasan layanan menunjukkan adanya budaya kerja yang responsif, adaptif dan berintegritas di LLDIKTI Wilayah V.

Dalam mewujudkan budaya pelayanan EKA PRIMA (Efisien, Komitmen, Akurat, Profesional, Responsif, Informatif, Mutu dan Akuntabel), LLDIKTI Wilayah V memiliki kemampuan adaptasi digital yang cukup baik melalui layanan online dan komunikasi publik yang aktif. Keberadaan layanan berbasis daring seperti PUNTADEWA, EVIRA, JANAKA dan lain sebagainya menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan pelayanan berjalan efektif, efisien, dan mudah diakses oleh perguruan tinggi, dosen, serta masyarakat. Seluruh layanan online ini sudah terintegrasi dalam platform PANDAWA yang mempermudah stakeholder memanfaatkan layanan LLDIKTI Wilayah V. Selanjutnya, diperlukan pengembangan sistem peringatan dini dan mekanisme pengawasan berbasis risiko yang dapat meningkatkan ketepatan pelaporan, terutama bagi PTS yang tingkat kepatuhannya masih rendah.

Pada proses kerja yang dilakukan, LLDIKTI Wilayah V memiliki berbagai metode pembinaan yang diterapkan mulai dari fasilitasi di bidang penjaminan mutu, tata kelola kelembagaan, kerjasama, akademik, kemahasiswaan, peningkatan SDM, penguatan integritas hingga pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Pembinaan dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko, sehingga PTS dengan tantangan terbesar dapat memperoleh pendampingan lebih intensif. Selain itu, integrasi lintas bidang pembinaan sangat penting untuk mencegah fragmentasi program dan memastikan efisiensi sumber daya.

LLDIKTI Wilayah V memiliki pengelolaan anggaran yang efektif dengan serapan yang konsisten tinggi, sehingga menjadi modal kuat untuk mendukung program pembinaan yang lebih strategis. Pada periode mendatang, pengalokasian anggaran perlu diarahkan berdasarkan prioritas risiko PTS, pengembangan metode pembinaan hybrid yang lebih hemat biaya, serta dukungan fasilitasi peningkatan mutu bagi PTS kecil seperti percepatan akreditasi, penguatan tata kelola, digitalisasi, dan implementasi kebijakan nasional.

Dengan berbagai potensi tersebut, LLDIKTI Wilayah V memiliki landasan yang kuat untuk meningkatkan efektivitas pembinaan pada periode 2025–2029 dan mendorong terwujudnya mutu perguruan tinggi yang lebih merata dan berkelanjutan.

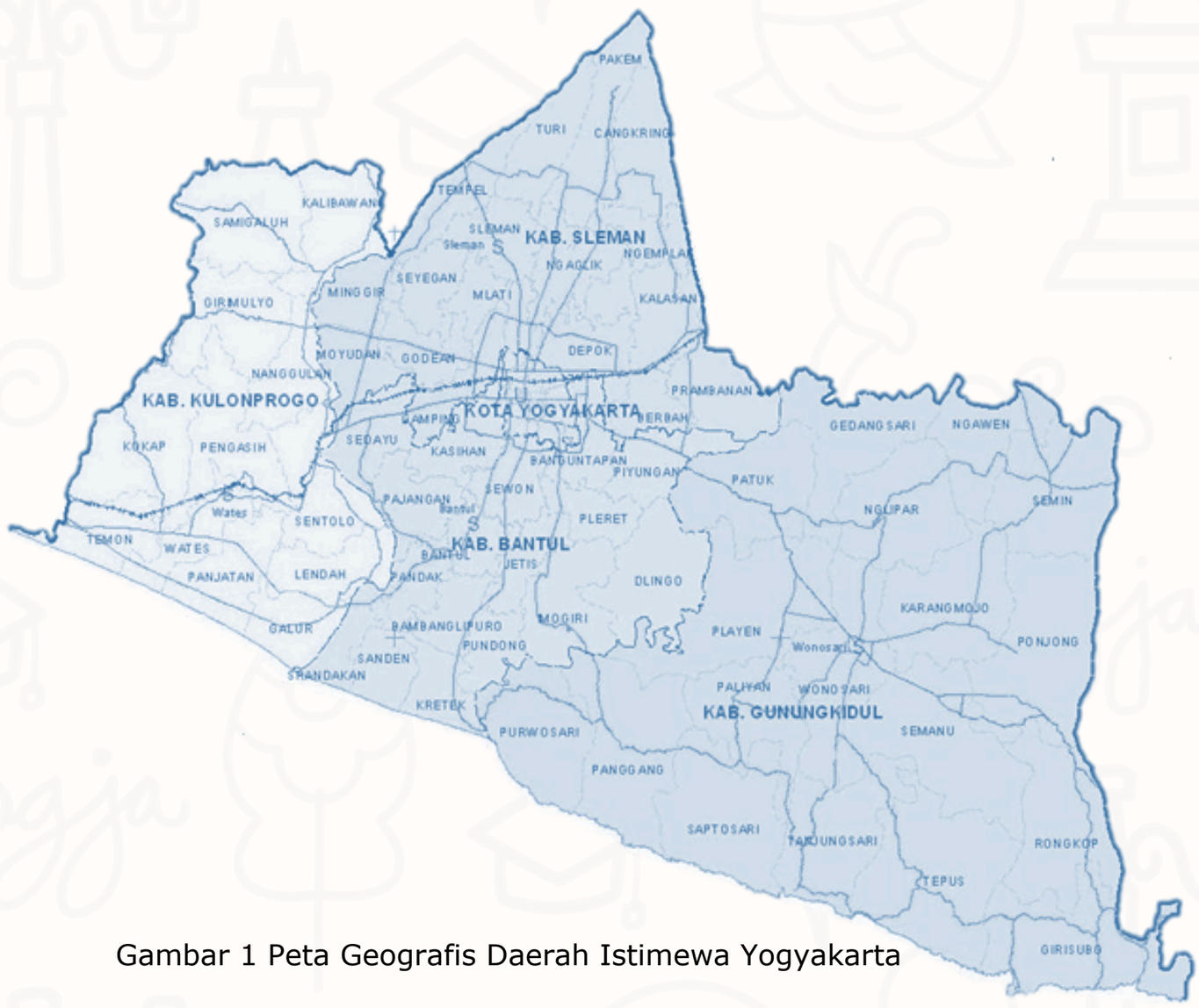

Gambar 1 Peta Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta

Peluang (*Opportunity*)

DIY dengan luas geografis 3.185,8 KM2 terbagi ke dalam 5 Kabupaten/Kota yaitu Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul, pada akhir tahun 2024 memiliki 100 PTS di bawah Kemdiktisaintek yang terdiri dari 30 Universitas, 6 Institut, 31 Sekolah Tinggi, 22 Akademi, 10 Politeknik, dan 1 Akademi Komunitas. Sedangkan jumlah program studi sebanyak 761 prodi, dan 194.021 mahasiswa aktif. (sumber: data internal LLDIKTI V Desember 2024). Sebaran lokasi Perguruan tinggi swasta di DIY yang relatif berdekatan menjadi peluang dan potensi strategis yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi. Kondisi ini memudahkan akses LLDIKTI Wilayah V dalam interaksi, koordinasi, dan pendampingan langsung ke PTS yang lebih optimal dan efisien.

Selain itu, kondisi geografis yang berdekatan dan adanya komitmen bersama antara Badan Penyelenggara dengan Perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah V guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi, juga mendorong terbentuknya sinergi dan jejaring kerjasama antar PTS melalui program Joint Resources antar-PTS dalam pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana prasarana, serta peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi tersebut menjadi modal penting dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan di wilayah DIY.

Keberadaan 9 PTS dengan akreditasi unggul di DIY merupakan peluang strategis (Opportunity) dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. PTS terakreditasi Unggul tersebut dapat berperan sebagai rujukan role model dan sumber praktik baik (best practice) dalam pengelolaan institusi, penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, serta penerapan sistem penjaminan mutu internal yang efektif. Keunggulan yang dimiliki oleh PTS terakreditasi Unggul memberikan nilai strategis untuk direplikasi dan diseminasi kepada PTS lainnya melalui program pembinaan dan pendampingan yang lebih terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Dalam hal ini LLDIKTI Wilayah V dapat memfasilitasi proses alih pengetahuan dan pengalaman, baik melalui forum berbagi praktik baik, pendampingan berbasis klaster, maupun program mentoring antar perguruan tinggi.

Di sisi lain, meningkatnya kesiapan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi membuka ruang perluasan kemitraan dalam riset, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai program strategis yang relevan dengan kebutuhan wilayah. Peluang tersebut semakin diperkuat melalui potensi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), khususnya pada isu-isu prioritas daerah seperti pariwisata, kesehatan, penguatan ekonomi wilayah, dan sektor-sektor unggulan lainnya. Momentum transformasi pendidikan tinggi nasional pada periode 2025–2029 yang menekankan penguatan program berdampak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan riset, serta pencapaian indikator kinerja utama (IKU) juga selaras dengan agenda penguatan peran LLDIKTI Wilayah V sebagai fasilitator dan penggerak peningkatan mutu PTS.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi Presiden periode 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini kemudian dicapai menjadi delapan misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJM Nasional 2025-2029 kemudian menentukan delapan prioritas nasional (PN) sebagai implementasi langsung dari Asta Cita. Kemdiktisaintek memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan PN 4, yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas". Oleh karena itu, Kemdiktisaintek kemudian menentukan visi dalam Renstra 2025-2029 yang berbunyi "Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045".

Demi membangun fondasi yang kuat dalam merealisasikan sasaran pembangunan nasional, Pemerintah kemudian menetapkan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk menjawab tantangan pembangunan secara cepat, tepat, dan terukur. Delapan PHTC tersebut adalah:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Kemdiktisaintek mengambil peran strategis dalam empat PHTC, yaitu program 3, 4, 5, dan 6. Pada program 3 yaitu “Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional”, Kemdiktisaintek mendukung pencetakan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian dengan pendekatan sains dan teknologi. Program ini ditujukan untuk membangun lumbung pangan di tingkat desa, daerah, hingga nasional. Perguruan tinggi didorong untuk melakukan riset terapan di bidang pertanian, memperkuat hilirisasi hasil inovasi pertanian, dan mengembangkan teknologi tepat guna untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Peran pendidikan tinggi dalam program ini mencakup penyediaan tenaga ahli, inovasi teknologi pertanian, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat petani dan pemerintah daerah.

Pada program 4 yaitu “Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi”, Kemdiktisaintek turut berperan dalam pembangunan sekolah-sekolah unggulan yang terintegrasi di setiap kabupaten. Hal ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi antara pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah, termasuk dalam bidang pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan. Selain membangun sekolah baru yang berkualitas, program ini juga menargetkan renovasi sekolah-sekolah yang sudah ada namun membutuhkan perbaikan. Pendidikan tinggi, khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), diharapkan menjadi mitra utama dalam mencetak guru-guru unggul serta mendukung inovasi pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut.

Pada program 5 yaitu “Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut”, Kemdiktisaintek berperan dengan penguatan dan perluasan KIP Kuliah sebagai instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui KIP Kuliah, kementerian berkontribusi pada pengurangan beban ekonomi rumah tangga ekonomi lemah sekaligus membuka jalan mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi.

Pada program 6 yaitu “Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara”, Kemdiktisaintek memberikan dukungan dengan memastikan skema tunjangan kinerja dosen sebagai langkah peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja. Kebijakan tunjangan kinerja dosen akan diintegrasikan dengan skema Manajemen Talenta Nasional, sehingga peningkatan kesejahteraan diikuti dengan program peningkatan kapasitas, kinerja, dan insentif berbasis merit. Selain itu, melalui agenda transformasi kelembagaan, kementerian mendorong kemandirian perguruan tinggi agar mampu mengelola sumber daya dan pembiayaan secara lebih berdaya. Kemandirian ini membuka ruang bagi penerapan skema remunerasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai kinerja.

Visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 2025–2029 adalah terwujudnya “Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045”. Poin inklusif pada visi Kemdiktisaintek merujuk pada komitmen untuk secara aktif melibatkan dan mengakomodasi keberagaman individu, kelompok, dan perspektif, dengan memastikan kesetaraan akses, kesempatan, dan partisipasi bermakna bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Poin ini juga menekankan inklusivitas dan peningkatan partisipasi bagi kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, penduduk daerah 3T, dan sebagainya.

Inklusivitas juga tidak hanya diwujudkan secara pasif, namun juga dengan secara aktif mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dari kelompok rentan. Poin adaptif diartikan sebagai pengelolaan perguruan tinggi, sains, dan teknologi yang dapat menjawab berbagai tantangan dan instabilitas, baik di tingkat nasional maupun global. Terakhir, poin berdampak menekankan bahwa pendidikan tinggi, sains, dan teknologi harus memiliki dampak yang secara riil dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Pada Renstra Kemdiktisaintek Tahun 2025-2029 ini, dampak yang diharapkan secara lebih spesifik adalah Kemdiktisaintek yang mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, delapan Asta Cita, serta Prioritas Nasional 4 dalam RPJM Nasional 2025-2029. Secara lebih khusus, visi Kemdiktisaintek diwujudkan melalui tiga fokus yang diemban masing-masing direktorat jenderal, yaitu pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, peningkatan kapasitas dan produktivitas riset dan pengembangan, serta pengoptimalan ekosistem, pembudayaan dan solusi sains, teknologi, dan inovasi.

Kemdiktisaintek juga menetapkan lima tata nilai yang tertanam dalam Visi Kementerian. Visi Kemdiktisaintek 2025–2029 menegaskan komitmen untuk mewujudkan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang inklusif dengan semangat kolaboratif, adaptif dengan tetap menjaga akuntabilitas, serta berdaya saing global sehingga berdampak nyata bagi transformasi bangsa. Inklusivitas menjadi fondasi utama yang memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, terutama kelompok rentan, dapat mengakses dan berpartisipasi secara bermakna dalam pendidikan tinggi, riset, dan inovasi. Semangat kolaboratif memperkuat inklusivitas dengan membangun sinergi berbagai pihak—dari akademisi, industri, pemerintah, hingga masyarakat sipil—dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan transparansi. Pendekatan inklusif dengan semangat kolaboratif diwujudkan melalui kemitraan lintas sektor yang mencakup keberagaman perspektif dan kebutuhan, tanpa diskriminasi, sehingga terwujud ekosistem pendidikan, sains, dan teknologi yang terbuka, adil, dan merata. Menghadapi dinamika dan tantangan baik di tingkat nasional maupun global, pengelolaan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi haruslah adaptif dengan tetap menjaga akuntabilitas. Kelincahan untuk merespons perubahan secara cepat dan efektif, menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi yang berkembang, serta mengantisipasi tantangan masa depan dengan fleksibilitas dan ketahanan menjadi kunci keberhasilan transformasi bangsa. Namun, sifat adaptif tersebut harus tetap dibarengi dengan akuntabilitas yang tinggi. Kebijakan dan program yang dijalankan harus transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Standar etika dan profesionalitas menjadi landasan dalam menjaga kepercayaan publik.

2.1. Visi

Visi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V ditentukan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia serta Visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan mewujudkan:

"Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V yang bersih dan melayani dalam mewujudkan pendidikan tinggi Yogyakarta yang unggul, kolaboratif, inklusif, adaptif dan berdampak"

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia serta Visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V berkomitmen untuk menjadi institusi yang bersih dan melayani dalam mewujudkan pendidikan tinggi Yogyakarta yang unggul, kolaboratif, inklusif, Adaptif dan berdampak. Poin bersih dan melayani pada visi LLDIKTI Wilayah V merujuk pada komitmen melaksanakan program Reformasi Birokrasi untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Poin unggul merupakan perwujudan pelaksanaan tugas LLDIKTI Wilayah V untuk melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pembangunan budaya mutu yang berkelanjutan menuju perguruan tinggi unggul. Poin kolaboratif merupakan prinsip strategis dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan relevansi kurikulum, peningkatan kualitas riset dan inovasi, serta kesiapan lulusan dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan dunia kerja, yang diwujudkan melalui kolaborasi antarperguruan tinggi serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri.

Poin Inklusif mencerminkan komitmen untuk menjamin kesetaraan akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi tanpa adanya diskriminasi. Poin adaptif merujuk pada pengelolaan perguruan tinggi yang responsif terhadap dinamika perubahan kebijakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta tantangan sosial, ekonomi, dan global yang terus berkembang. Terakhir, poin berdampak menekankan bahwa pendidikan tinggi harus memiliki dampak yang secara riil dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Komitmen LLDIKTI Wilayah V dalam mewujudkan visinya tercermin melalui tata nilai empat saka guru yaitu Intergritas, Budaya Mutu, Kolaboratif, dan Berdampak yang menjadi tiang utama penopang peningkatan mutu pendidikan tinggi menuju perguruan tinggi unggul dan memberikan dampak atau manfaat bagi masyarakat.

Integritas

Integritas dimaknai sebagai komitmen aparatur untuk menjunjung kejujuran, etika, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan tinggi, integritas diwujudkan melalui pelayanan yang transparan, adil, dan profesional guna mendukung tata kelola perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, LLDIKTI Wilayah V berkomitmen membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini dibuktikan pada tahun 2023 LLDIKTI Wilayah V berhasil meraih predikat ZI-WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan saat ini sedang berprogres untuk meraih predikat WBBM. Predikat ZI-WBK dan WBBM menjadi semangat dalam memberikan layanan prima khususnya dalam rangka fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Budaya Mutu

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan suatu amanah Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 pada Pasal 51, ayat (1) yaitu untuk menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu. Pasal 52 ayat (1) menyatakan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi harus dijiwai oleh semangat *Continuous Quality Improvement* sebagai pendekatan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berorientasi pada pelampauan standar mutu. Semangat ini menekankan bahwa mutu pendidikan tinggi bukan merupakan capaian sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang menuntut komitmen seluruh pemangku kepentingan. LLDIKTI Wilayah V terus berkomitmen dalam memberikan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi dengan mendorong perguruan tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui penerapan siklus PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi secara konsisten.

Melalui penetapan standar yang jelas, pelaksanaan yang efektif, serta evaluasi dan pengendalian yang objektif, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi area perbaikan. Tahap peningkatan kemudian menjadi dasar untuk menyempurnakan standar dan praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga mutu akademik, tata kelola, serta relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kolaboratif

Kolaboratif dipahami sebagai prinsip strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi yang menekankan pentingnya sinergi antarperguruan tinggi serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Melalui kolaborasi tersebut, relevansi kurikulum dapat diperkuat agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja, sekaligus mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi yang berdampak. Pendekatan kolaboratif juga berperan dalam menyiapkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap berkontribusi dalam menjawab kebutuhan pembangunan nasional dan tantangan global. Dalam membangun kolaborasi atau kerjasama antarperguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, LLDIKTI Wilayah V mengusung semangat Ndulur Lima, sebagai sinergi untuk saling melengkapi, berbagi sumber daya, dan memperkuat keunggulan masing-masing perguruan tinggi sehingga tidak terjebak dalam persaingan yang tidak sehat.

Berdampak

LLDIKTI Wilayah V selain memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan juga berkomitmen mendorong agar perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat, melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui pendidikan, perguruan tinggi menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Dalam bidang penelitian, perguruan tinggi berkontribusi menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang mampu menjawab permasalahan nyata di masyarakat. Hasil riset tersebut selanjutnya dihilirisasikan agar dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha, industri, pemerintah daerah, dan komunitas. Pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana penerapan keilmuan secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Perguruan tinggi juga berperan sebagai pusat pemikiran dan solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan degradasi lingkungan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, perguruan tinggi memperluas jangkauan dan keberlanjutan dampak programnya. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan ketercapaian visi yang telah ditetapkan, LLDIKTI Wilayah V menetapkan misi:

1. Mewujudkan tata kelola layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung birokrasi yang bersih dan melayani;
2. Mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan;
3. Mewujudkan penguatan kolaborasi dan kemitraan perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan.

Adapun penjabaran misi yang ditetapkan:

2.2.1. Mewujudkan tata kelola layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung birokrasi yang bersih dan melayani

Misi ini dilaksanakan melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan, serta pembangunan budaya kerja yang berintegritas, responsif, dan berorientasi pada pelayanan. Melalui penyelenggaraan layanan yang efektif, efisien profesional, transparan, dan akuntabel, LLDIKTI Wilayah V berkomitmen mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi fondasi utama dalam memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas layanan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi.

2.2.2. Mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan

Misi ini menegaskan komitmen LLDIKTI Wilayah V dalam memperluas akses pendidikan tinggi yang adil dan setara, melalui peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan budaya mutu, penerapan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta dorongan agar perguruan tinggi mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, dan dinamika masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah V diharapkan semakin inklusif, unggul, adaptif, dan berdaya saing.

2.2.3. Mewujudkan penguatan kolaborasi dan kemitraan perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan

Misi ini diarahkan pada penguatan sinergi dan kemitraan strategis antarperguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pembangunan. Kolaborasi tersebut didorong untuk memperkuat relevansi pembelajaran, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk melalui hilirisasi hasil riset dan pemanfaatan keunggulan perguruan tinggi bagi penyelesaian persoalan nyata. Dalam konteks Yogyakarta sebagai kota pendidikan, misi ini juga memperkuat peran pendidikan tinggi yang berakar pada nilai, norma, budaya, dan semangat kolaboratif demi terwujudnya manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

2.3. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi misi LLDIKTI Wilayah V menjadi institusi yang bersih dan melayani dalam mewujudkan pendidikan tinggi Yogyakarta yang unggul, kolaboratif, inklusif, adaptif dan berdampak sekaligus mendukung visi misi Kemdiktisaintek, LLDIKTI Wilayah V merumuskan tujuan strategis sebagai berikut:

No	Tujuan Kemdiktisaintek	Tujuan LLDIKTI Wilayah V	Indikator Tujuan LLDIKTI Wilayah V
1	Menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung birokrasi yang bersih dan melayani	Persentase Kepuasan Layanan
2	Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu	Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi yang bermutu	1) Jumlah PTS terakreditasi unggul; 2) Jumlah Prodi terakreditasi Unggul; 3) Jumlah prodi yang mendapatkan rekognisi internasional
	Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi		
3	Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Meningkatnya kolaborasi dan kemitraan perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan	1. Jumlah PTS yang meningkat kerja sama tridharma dengan mitra pemangku kepentingan; 2. Jumlah PTS yang meningkat kinerja penelitian dan pengabdian pada masyarakat

Tabel 7 Tujuan dan Indikator Tujuan

2.3.1. Meningkatnya tata kelola layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung birokrasi yang bersih dan melayani

Tujuan dari LLDIKTI Wilayah V dalam mewujudkan meningkatnya tata kelola layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung birokrasi yang bersih dan melayani diarahkan pada penguatan mutu layanan publik, peningkatan kualitas tata kelola organisasi, serta optimalisasi kinerja pelaksanaan anggaran dalam rangka fasilitasi peningkatan mutu pendidikantnggi. Tujuan ini diwujudkan melalui peningkatan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI sebagai cerminan keunggulan layanan yang responsif, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Adapun Indikator tujuannya yaitu persentase kepuasan layanan.

2.3.2. Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi yang bermutu

Tujuan dari meningkatnya relevansi pendidikan tinggi yang bermutu yaitu untuk memperluas akses pendidikan tinggi yang adil dan setara melalui peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan budaya mutu, penerapan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta dorongan agar perguruan tinggi mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, dan dinamika masyarakat. Adapun indikatornya meningkatnya relevansi pendidikan tinggi yang bermutu yaitu jumlah PTS terakreditasi unggul; Jumlah Prodi terakreditasi Unggul; dan Jumlah prodi yang mendapatkan rekognisi internasional.

2.3.3. Meningkatnya kolaborasi dan kemitraan perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan

Tujuan dari meningkatnya kolaborasi antarperguruan tinggi serta kemitraan dengan dunia usaha, industri, dan pemangku kepentingan lainnya yang berdampak nyata bagi masyarakat yaitu terlaksananya sinergi dan kemitraan strategis antarperguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pembangunan. Kolaborasi tersebut didorong untuk memperkuat relevansi pembelajaran, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk melalui hilirisasi hasil riset dan pemanfaatan keunggulan perguruan tinggi bagi penyelesaian persoalan nyata di masyarakat. Adapun indikator tujuannya yaitu Jumlah PTS yang meningkat kerja sama tridharma dengan mitra pemangku kepentingan; dan Jumlah PTS yang meningkat kinerja penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Adapun dari tujuan yang ditetapkan di atas, masing-masing tujuan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa Sasaran Kegiatan yang menjadi ukuran kinerjanya. Berikut sasaran dan indikator sasarannya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).	Keunggulan Layanan	Terdapat risiko penurunan keunggulan layanan LLDIKTI Wilayah V akibat belum meratanya kapasitas dan kompetensi SDM, kapasitas pengembangan layanan digital yang terselesaikan, perubahan regulasi yang cepat, serta belum terintegrasinya data dan pengukuran kinerja internal sehingga kualitas, kecepatan, dan konsistensi layanan kepada PTS tidak optimal.	Melakukan standardisasi dan evaluasi SOP layanan, penguatan kapasitas SDM, pengembangan layanan digital terpadu dan dashboard pemantauan kinerja, monitoring berkala SKM/pengaduan, serta percepatan tindak lanjut perbaikan layanan berbasis data.	Tim Kerja Keprotokolan, Kehumasan, dan Sekretariat Pimpinan
	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta	Terdapat risiko target arsitektur perguruan tinggi swasta tidak tercapai karena ketimpangan kapasitas sumber daya PTS, penurunan jumlah mahasiswa, dan rendahnya kesadaran PTS untuk transformasi, penggabungan/ penyatuan	Melakukan pemetaan PTS berbasis risiko, penyusunan early warning system untuk PTS berisiko, pendampingan intensif penjaminan mutu dan tata Kelola kelembagaan, , , serta fasilitasi coaching clinic dan advokasi transformasi untuk penggabungan/ penyatuan PTS.	Tim Kerja SPMI dan Akreditasi dan Tim Kerja Kelembagaan
	Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	Terdapat risiko terhadap Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas karena penurunan predikat SAKIP yang disebabkan belum adanya aplikasi pengukuran kinerja internal yang terintegrasi, dan pembagunan Zona Integritas menuju WBBM terkendala resistensi dalam internalisasi pembangunan budaya kerja dan pola pikir.	Perlu diselesaikannya pembuatan aplikasi pengukuran kinerja internal yang terintegrasi dan optimalisasi pembangunan budaya kerja dan pola pikir kepada seluruh pegawai untuk mengurangi resistensi	Kepala Bagian Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.	Fasilitasi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta oleh LLDIKTI	Terdapat risiko cakupan fasilitasi peningkatan mutu PTS oleh LLDIKTI tidak mencapai target karena perubahan kebijakan yang cepat, kurangnya pemahaman dan komitmen PTS dalam implementasi SPMI dan serta keterbatasan sumber daya perguruan tinggi	Melaksanakan sosialisasi dan asistensi yang lebih tersegmentasi berdasarkan klaster PTS, memperbanyak layanan klinik mutu/SPMI dan konsultasi serta melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pascakegiatan.	Tim Kerja SPMI dan Akreditasi dan Tim Kerja Pembelajaran dan Kemahasiswaan
	Pencegahan dan Penanganan AntiKekerasan, AntiNarkoba, dan AntiKorupsi	Terdapat risiko target PTS yang mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi tidak tercapai karena belum seluruh PTS memiliki kebijakan internal Pencegahan dan Penanganan AntiKekerasan, AntiNarkoba, dan AntiKorupsi	Melakukan sosialisasi regulasi secara berkala,, pendampingan pembentukan satgas dan mekanisme pelaporan dan penanganan, serta penguatan kolaborasi dengan pemda, aparat penegak hukum, BNN, dan pihak terkait lainnya.	Tim Kerja Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.	Fasilitasi Pengembangan Kemahasiswaan dan Prestasi oleh LLDIKTI.	Terdapat risiko fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi belum menjangkau PTS secara merata karena keterbatasan kapasitas pengelola kemahasiswaan, jejaring mitra, pendanaan, dan pelaporan kegiatan; akibatnya partisipasi mahasiswa dan capaian prestasi masih terkonsentrasi pada PTS tertentu.	Melakukan pemetaan kebutuhan PTS, pendampingan dan bimtek kemahasiswaan secara berjenjang, fasilitasi berbagi praktik baik antarkampus, penguatan layanan karier/minat bakat/PPKPT, penyediaan kalender pembinaan dan klinik proposal/kompetisi, serta pemantauan bukti tindak lanjut dan capaian prestasi.	Tim Kerja Pembelajaran dan Kemahasiswaan
	Jumlah Dosen PTS yang Meningkat Jabatan Fungsionalnya	Terdapat risiko jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsional tidak mencapai target karena dosen belum memahami persyaratan dan strategi pengusulan, kelengkapan dokumen dan angka kredit belum memadai, verifikasi di tingkat PTS belum cepat, serta adanya perubahan regulasi atau interpretasi teknis jabatan akademik.	Melaksanakan klinik percepatan jabatan fungsional secara rutin, pendampingan penyusunan DUPAK/portofolio dan dokumen kepakaran, penyediaan checklist dan desk review berkas, penguatan koordinasi dengan operator kepegawaian PTS, serta monitoring pipeline usulan sampai terbitnya keputusan kenaikan jabatan fungsional.	Tim Kerja Sumber Daya Perguruan Tinggi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, dan Kemitraan PTS	Terdapat risiko target fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, dan kemitraan PTS tidak tercapai karena budaya riset dan publikasi belum merata, kapasitas peneliti/dosen masih bervariasi, keberlanjutan kemitraan masih lemah, dan tindak lanjut output pascafasilitasi belum konsisten.	Melakukan coaching clinic proposal, publikasi, HKI, dan kemitraan secara tematik; pendampingan SINTA/Scopus/WoS; fasilitasi matching dengan mitra; penetapan output minimum setiap kegiatan; serta monitoring rencana aksi dan hasil tindak lanjut PTS penerima fasilitasi.	Tim Kerja Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Tim Kerja Networking
Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Nilai Kerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L	Terdapat risiko Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L tidak mencapai target dalam rangka mendukung meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, apabila perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran belum berjalan secara efektif, tepat waktu, efisien, dan selaras dengan target output serta kebutuhan layanan	Perlakuan risiko dilakukan melalui penguatan perencanaan, ketepatan pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi berkala, serta peningkatan koordinasi dan kapasitas SDM agar pelaksanaan RKA-K/L lebih efektif, efisien, dan selaras dengan target layanan.	Urusan Keuangan

Tabel 8 Sasaran dan Indikator Sasaran

BAB III - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui kerangka Diktisaintek Berdampak. Seluruh kebijakan ini berorientasi pada visi mewujudkan "pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam transformasi menuju Indonesia Emas 2045".

Kebijakan Diktisaintek Berdampak merupakan kerangka transformasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam melaksanakan amanat nasional terkait penguatan ketahanan pangan, energi, dan air; percepatan hilirisasi dan industrialisasi; serta peningkatan kualitas pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, dan sumber daya manusia. Kebijakan ini menempatkan pendidikan tinggi sebagai instrumen strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan, pelestarian lingkungan, dan perlindungan kelompok rentan.

Transformasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat pemerataan akses dan mutu pendidikan tinggi, merespons tantangan sosial-ekonomi, serta memastikan bahwa pendidikan tinggi menghasilkan lulusan, riset, dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Pendidikan tinggi diarahkan menjadi pusat solusi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan penekanan pada relevansi lulusan, fleksibilitas pembelajaran, orientasi keluaran, dan penguatan kolaborasi dengan dunia usaha, industri, pemerintah, dan masyarakat.

Gambar 2 Transformasi Kebijakan Kemdiktisaintek Menuju Dampak Nyata bagi Bangsa

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Arah Kebijakan dan Staretgi Kemdiktisaintek dibagi dalam 3 arahan, yakni arah yang mendukung tercapainya PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat), Prioritas Presiden dan Arah kebijakan dan strategi secara umum dalam agenda mendukung agenda pembangunan nasional. Beriut arah dan kebijakan Kemdiktisaintek dalam tercapainya Prioritas Presiden dan arah kebijakan dan strategi umum yang dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemdiktisaintek dalam mendukung Program Prioritas Presiden

No	Prioritas	Keterangan
1	Priortitas 1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Kemdiktisaintek mendorong kontribusi nyata dari perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menciptakan inovasi teknologi untuk pertanian, energi terbarukan, dan konservasi air. Program riset dan pengabdian masyarakat diarahkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian nasional dalam sektor-sektor vital ini.
2	Prioritas 8	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. Inilah jantung peran Kemdiktisaintek. Peningkatan mutu pendidikan tinggi, percepatan transformasi digital di kampus, dan pengembangan ekosistem riset yang terintegrasi menjadi bagian dari strategi besar menuju masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge society)
3	Prioritas 10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kemdiktisaintek berkomitmen pada pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Kampus-kampus didorong untuk membangun sistem pembelajaran yang ramah gender, menyediakan layanan disabilitas, serta membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi kelompok rentan dan terpinggirkan
4	Prioritas 11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup. Melalui kurikulum hijau, riset keberlanjutan, serta pengembangan laboratorium hidup (living labs), perguruan tinggi diharapkan menjadi pusat edukasi dan inovasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kemdiktisaintek juga mendukung penelitian penelitian yang berbasis ekologi dan perubahan iklim.
5	Prioritas 15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim. Kemdiktisaintek mengambil peran penting dalam proses hilirisasi melalui integrasi hasil riset ke dalam industri nasional. Fokusnya adalah menghasilkan inovasi yang aplikatif, membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat penciptaan nilai tambah dalam negeri, terutama di sektor maritim dan sumber daya alam. Kebijakan yang dilakukan adalah intervensi strategis dan berkelanjutan, terintegrasi dan berdampak nyata dalam mendukung swasembada pangan, energi, kesehatan (obat, alat kesehatan dan tenaga kesehatan), pertahanan, maritim, biomaterial dan bahan baku industri (termasuk logam dan mineral), teknologi informasi dan kecerdasan buatan
6	Prioritas 17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga. Kemdiktisaintek mendorong pendidikan tinggi tidak hanya pada aspek sains dan teknologi, tetapi juga pada pelestarian kebudayaan nasional. Perguruan tinggi seni, lembaga riset budaya, serta kegiatan mahasiswa di bidang seni dan olahraga difasilitasi untuk menjadi ruang ekspresi dan pencapaian prestasi tingkat nasional hingga nternasional.

Tabel 9 Arah Kebijakan dan Strategi Kemdiktisaintek dalam mendukung Program Prioritas Presiden

3.1.2 Arah Kebijakan Kemdiktisaintek secara umum

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai
1	Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Berkembangnya STEAM di Pendidikan Tinggi	a. Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau. b. Meningkatnya sarana dan prasana pendidikan tinggi yang merata. c. Meningkatnya kelembagaan perguruan tinggi yang inklusif. d. Meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah e. Meningkatnya kualitas bidang STEAM di perguruan tinggi f. Mewujudkan sistem pendidikan tinggi inklusif dan g. responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan
2	Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan Pendidikan Tinggi yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja	a. Meningkatnya lulusan pendidikan tinggi yang memiliki keahlian menengah-tinggi. b. Meningkatnya relevansi bidang STEAM di perguruan tinggi. c. Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik. d. Menguatnya mutu profesi guru. e. Menguatnya mutu lembaga pelaksana pendidikan tenaga kependidikan. f. Meningkatnya mutu dan relevansi pembelajaran pada perguruan tinggi.
3	Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja	a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi. b. Meningkatnya relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan dunia kerja.
4	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan SDM Pendidikan Tinggi	a. Meningkatnya kualifikasi SDM Pendidikan Tinggi. b. Meningkatnya kompetensi dan tata kelola SDM Pendidikan Tinggi.
5	Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi yang Memiliki Kompetensi Tingkat Internasional	a. Meningkatnya kualitas talenta di bidang iptek dan inovasi. b. Meningkatnya mahasiswa yang meraih prestasi di tingkat nasional atau internasional. c. Terselenggaranya layanan pendidikan di SMA Unggul Garuda yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global.
6	Peningkatan Kontribusi Perguruan Tinggi Berdasarkan Keunggulan	a. Meningkatnya peran lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dalam mengelola iptek dan inovasi. b. Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi. c. Menguatnya rekognisi perguruan tinggi di tingkat global.
7	Peningkatan Peran Lembaga di Perguruan Tinggi dalam Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	a. Meningkatnya peran Science Techno Park (STP) dalam melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi. b. Meningkatnya peran lembaga yang melakukan diseminasi sains dan teknologi
8	Peningkatan Kualitas Keluaran Riset yang Berdampak	a. Meningkatnya kolaborasi riset perguruan tinggi b. Meningkatnya nilai keluaran riset perguruan tinggi
9	Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait Pendidikan Tinggi, Riset Pengembangan, Sains Teknologi yang Berdampak	a. Tersusunnya dokumen kebijakan pendidikan tinggi yang berkualitas. b. Tersusunnya dokumen kebijakan riset dan pengembangan yang berkualitas. c. Tersusunnya dokumen kebijakan sains dan teknologi yang berkualitas
10	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	peningkatan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Tabel 10 Arah Kebijakan dan Strategi Kemdiktisaintek dalam mendukung Program Prioritas Presiden

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi LLDIKTI Wilayah V

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Kemdiktisaintek tersebut, LLDIKTI Wilayah V mengemban peran strategis untuk memastikan implementasi kebijakan nasional di tingkat perguruan tinggi dapat berjalan efektif, terukur, dan sesuai karakteristik ekosistem pendidikan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi LLDIKTI Wilayah V disusun untuk mendukung penguatan akses dan mutu, peningkatan kinerja tridharma, serta penataan tata kelola perguruan tinggi, sehingga mampu berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan Diktisaintek Berdampak dan agenda pembangunan nasional. Arah Kebijakan dan Strategi LLDIKTI Wilayah V dibagi dalam Prioritas Presiden dan arah kebijakan dan strategi umum yang dijabarkan dalam tabel berikut:

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi LLDIKTI Wiayah V dalam mendukung Program Prioritas Presiden

No	Prioritas Presiden/ Arah Kabijakan Kemdiktisaintek	Arah Kebijakam LLDIKTI Wilayah V	Strategi LLDIKTI Wilayah V
1	Prioritas 1 Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Kemdiktisaintek mendorong kontribusi nyata dari perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menciptakan inovasi teknologi untuk pertanian, energi terbarukan, dan konservasi air. Program riset dan pengabdian masyarakat diarahkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian nasional dalam sektor-sektor vital ini.	Mendorong perguruan tinggi swasta di wilayah DIY untuk berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan air melalui penguatan riset terapan, inovasi teknologi tepat guna, serta pengabdian masyarakat yang berbasis kebutuhan lokal dan nasional.	1. Mendorong kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, industri, dan komunitas lokal dalam implementasi inovasi pangan, energi, dan air. 2. Mengarahkan hilirisasi riset agar menghasilkan produk, model, atau kebijakan terapan yang dapat direplikasi di tingkat daerah dan nasional. 3. Mengintegrasikan isu ketahanan pangan, energi, dan air melalui program KKN tematik berdampak.
2	Prioritas 8 Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. Inilah jantung peran Kemdiktisaintek. Peningkatan mutu pendidikan tinggi, percepatan transformasi digital di kampus, dan pengembangan ekosistem riset yang terintegrasi menjadi bagian dari strategi besar menuju masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge society)	Memperkuat ekosistem pendidikan tinggi berbasis sains dan teknologi melalui peningkatan mutu, transformasi digital, serta pengembangan riset yang terintegrasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge society)	1. Mendorong transformasi digital perguruan tinggi dalam tata kelola, pembelajaran, layanan akademik, dan sistem penjaminan mutu. 2. Memperkuat implementasi SPMI mellui budaya mutu berkelanjutan (PPEPP) untuk menuju perguruan tinggi unggul dan memiliki daya saing nasional dan global. 3. Memfasilitasi pengembangan ekosistem riset terpadu, termasuk kolaborasi antar-PTS dan akses terhadap sumber daya bersama (joint resources).

No	Prioritas Presiden/ Arah Kabijakan Kemdiktisaintek	Arah Kebijakam LLDIKTI Wilayah V	Strategi LLDIKTI Wilayah V
3	Prioritas 10 Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kemdiktisaintek berkomitmen pada pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Kampus-kampus didorong untuk membangun sistem pembelajaran yang ramah gender, menyediakan layanan disabilitas, serta membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi kelompok rentan dan terpinggirkan	Mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif, berkeadilan, dan ramah bagi seluruh warga negara, dengan menjamin kesetaraan akses serta perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	1. Mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan kebijakan dan sistem pembelajaran yang ramah gender dan inklusif disabilitas. 2. Memfasilitasi penguatan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas 3. Mendorong penguatan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. 4. Memastikan tata kelola layanan LLDIKTI Wilayah V bersifat adil, transparan, dan non-diskriminatif.
4	Prioritas 11 Menjamin pelestarian lingkungan hidup. Melalui kurikulum hijau, riset keberlanjutan, serta pengembangan laboratorium hidup (living labs), perguruan tinggi diharapkan menjadi pusat edukasi dan inovasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kemdiktisaintek juga mendukung penelitian yang berbasis ekologi dan perubahan iklim.	Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat edukasi, riset, dan inovasi keberlanjutan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup	Memperkuat kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dan komunitas dalam program pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal Yogyakarta

Tabel 11 Arah Kebijakan dan Strategi LLDIKTI Wilayah V yang mendukung Program Prioritas Presiden

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi LLDIKTI Wiayah V dalam mendukung Program Kemdiktisaintek secara umum

No	Arah Kebijakan Kemdiktisaintek	Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah V	Strategi LLDIKTI Wilayah V
1	Nomor 1 Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Berkembangnya STEAM di Pendidikan Tinggi	Memperkuat peran LLDIKTI Wilayah V dalam peninggkatan mutu dan inklusivitas pendidikan tinggi serta mendorong pengembangan STEAM di perguruan tinggi	1. Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTS melalui SPMI, AMI, dan pendampingan akreditasi; 2. Mendorong penguatan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus; 3. Mendorong pengembangan STEAM ke dalam kurikulum pembelajaran
2	Nomor 4 Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan SDM Pendidikan Tinggi	Mendukung peningkatan kualitas, kualifikasi, dan tata kelola SDM pendidikan tinggi secara berkelanjutan untuk menjamin mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi	Memfasilitasi peningkatan kualifikasi SDM pendidikan tinggi, khususnya dosen, melalui pembinaan karier dan akses program pengembangan kompetensi

No	Arah Kebijakan Kemdiktisaintek	Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah V	Strategi LLDIKTI Wilayah V
3	Nomor 6 Peningkatan Kontribusi Perguruan Tinggi Berdasarkan Keunggulan	Mengoptimalkan kontribusi perguruan tinggi sesuai dengan keunggulan, kekhasan, dan potensi wilayah untuk mendukung pembangunan daerah dan nasiona	1. Memfasilitasi pemetaan dan penguatan keunggulan institusional dan program studi perguruan tinggi; 2. Memperkuat kemitraan perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat; 3. Mengarahkan tri dharma perguruan tinggi agar menghasilkan kontribusi nyata dan berdampak sesuai kebutuhan wilayah DIY.
4	Nomor 8 Peningkatan Kualitas Keluaran Riset yang Berdampak	Mendorong peningkatan kualitas dan dampak keluaran riset perguruan tinggi melalui penguatan kolaborasi dan hilirisasi hasil riset	1. Memfasilitasi peningkatan kolaborasi riset antarperguruan tinggi dan dengan pemangku kepentingan; 2. Mendorong peningkatan kualitas riset dan publikasi; 3. Mengarahkan riset perguruan tinggi untuk menjawab persoalan nyata masyarakat dan pembangunan daerah.
5	Nomor 9 Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait Pendidikan Tinggi, Riset Pengembangan, Sains Teknologi yang Berdampak	Memperkuat peran LLDIKTI Wilayah V sebagai penghubung kebijakan pusat dan implementasi di PTS, serta memetakan kebutuhan nyata di DIY dan PTS.	1. Mendorong penyusunan dokumen dan implementasi penjaminnan mutu di PTS yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI); 2. Memfasilitasi penyelarasan kebijakan riset dan pengembangan dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional.
6	Nomor 10 Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabe	Mewujudkan tata kelola LLDIKTI Wilayah V yang transparan dan akuntabel melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.	1. Menguatkan praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel, termasuk melalui digitalisasi layanan; 2. Memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Tabel 12 Arah Kebijakan dan Strategi LLDIKTI V mendukung Program Kemdiktisaintek secara umum

3.3. Kerangka Regulasi

No	Regulasi	Keterangan	Peran dalam Sasaran Kinerja LLDIKTI 2025-2029
1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	UU ini mengamanatkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kemajuan bangsa. UU Sisdiknas sedang dalam proses revisi dengan pendekatan kodifikasi yang mengintegrasikan ketentuan dari tiga undangundang lain bidang pendidikan seperti UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No. 18/2019 tentang Pesantren.	Menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian). Menopang sasaran kinerja LLDIKTI pada peningkatan mutu layanan, pembinaan PTS, dan fasilitasi kegiatan Tridharma. Menjadi landasan pembinaan kualitas akademik dan penguatan layanan berbasis standar nasional.
2	Undang-Undang No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Berdasarkan amanat regulasi tersebut, arah kebijakan Kemdiktisaintek periode 2025-2029 difokuskan pada penguatan ekosistem riset, teknologi, dan inovasi nasional melalui pengembangan kapasitas kelembagaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di perguruan tinggi, peningkatan kualitas dan jumlah SDM Iptek khususnya dosen perguruan tinggi, serta optimalisasi pemanfaatan dan hilirisasi hasil riset untuk mendukung kebutuhan strategis nasional. Arah kebijakan dalam konteks ini juga mencakup dorongan terhadap pendanaan riset yang berkelanjutan dan kompetitif, penguatan tata kelola dan etika penelitian, serta penetapan prioritas riset sesuai kebutuhan nasional seperti Energi, Pertahanan, Digitalisasi: AI dan Semikonduktor, Hilirisasi dan Industrialisasi, Kesehatan, Pangan, Maritim, serta Material dan Manufaktur Maju	Mendukung sasaran LLDIKTI terkait inovasi, riset, publikasi, dan sinergi PTS dalam ekosistem riset. Menguatkan fasilitasi LLDIKTI dalam peningkatan kapasitas dosen sebagai SDM IPTEK, mendorong kolaborasi riset, dan mendukung hilirisasi inovasi perguruan tinggi. Relevan dengan sasaran: “Fasilitasi Penelitian, Publikasi dan Kemitraan PTS”
3	Peraturan Presiden No. 108/2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional	Beberapa arah kebijakan yang diamanatkan dalam regulasi tersebut antara lain: a. Perluasan talent pool dan daya pikat talenta melalui perbaikan regulasi terkait beban kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk fasilitasi jalur jenjang karier khusus dosen peneliti; b. Peningkatan jumlah Talenta potensial lulusan pendidikan tinggi yang berkiprah di bidang Riset dan Inovasi; c. Penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi Talenta melalui pemberian beasiswa jalur cepat S1 menuju S3 serta dukungan pendanaan riset mahasiswa S1/D4 tingkat akhir; d. Penguatan kolaborasi SDM Iptek yang mencakup optimalisasi pemanfaatan platform kolaborasi seperti Kedaireka; e. Penyediaan sarana dan prasarana esensial untuk MTN dengan pengembangan STP sebagai pusat kolaborasi komersialisasi produk inovasi.	Menjadi landasan LLDIKTI untuk pembinaan talenta dosen dan mahasiswa. Mendukung sasaran: peningkatan prestasi mahasiswa, fasilitasi kemahasiswaan, peningkatan jumlah dosen naik JF, dan peningkatan kapasitas riset. Memberikan kerangka kebijakan dalam pembinaan karier akademik dan riset.

No	Regulasi	Keterangan	Peran dalam Sasaran Kinerja LLDIKTI 2025-2029
4	Peraturan Presiden No.68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	Kebijakan dalam koridor kewenangan Kemdiktisaintek diarah pada aspek berikut: a. penyesuaian dan penyelarasan kurikulum pendidikan tinggi vokasi, b. penyelenggaraan akses pemagangan dan praktik kerja industri c. menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Kerja d. fasilitasi uji kompetensi dan sertifikat kompetensi/profesi bagi lulusan pendidikan tinggi vokasi e. menjalin koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan vokasi sendiri sebagai upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja di sektor masing-masing	Mendorong LLDIKTI untuk melakukan pembinaan prodi vokasi melalui sinkronisasi kurikulum, praktik kerja industri, uji kompetensi, dan kerja sama dunia usaha-dunia industri. Mendukung sasaran kinerja terkait peningkatan mutu PTS dan relevansi pendidikan vokasi.
5	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian	Regulasi tersebut menetapkan bahwa seluruh kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di Indonesia menjadi tugas dan fungsi kementerian, dalam hal ini Kemdiktisaintek	Menegaskan otoritas Kemdiktisaintek sebagai koordinator PT LLDIKTI wajib memastikan kepatuhan PT seluruh kementerian. Mendukung sasaran layanan, fasilitasi kelembagaan, serta sinkronisasi data kelembagaan di wilayah.
6	Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan	a. Pasal 208: memberikan amanat bagi kementerian yang membidangi pendidikan untuk melaksanakan pembinaan pendidikan tinggi dalam pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan b. Pasal 209: memberikan amanat kepada Kemdiktisaintek dengan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium dalam penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi	Menjadi dasar bagi LLDIKTI dalam pembinaan prodi kesehatan, pendidikan profesi, dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan bersama Kemenkes dan Kolegium. Mendukung sasaran: peningkatan mutu PTS kesehatan, pemenuhan standar profesi, dan fasilitasi evaluasi kelembagaan prodi kesehatan.
7	Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 jo. Nomor 60 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja LLDIKTI	Regulasi yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) sebagai unit pelaksana tugas Kemendikbudristek di wilayah.	Memberikan landasan formal kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur LLDIKTI. Menjadi dasar penyusunan sasaran kinerja layanan LLDIKTI, termasuk keunggulan layanan, SAKIP, ZI/WBK, serta kualitas pembinaan PTS.

No	Regulasi	Keterangan	Peran dalam Sasaran Kinerja LLDIKTI 2025-2029
8	Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Regulasi ini mengatur secara komprehensif standar nasional pendidikan tinggi, termasuk standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu internal dan eksternal melalui akreditasi. LLDIKTI berada dalam kerangka ini sebagai fasilitator peningkatan mutu dan pengelolaan perguruan tinggi di wilayah kerjanya.	Kerangka nasional SPMI–SPME; dasar pembinaan mutu akademik oleh LLDIKTI. Mendukung sasaran: peningkatan mutu PTS, peningkatan akreditasi, pembinaan SPMI/AMI, dan peningkatan JF dosen.
9	Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Tahun 2025 2029	menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi nasional untuk lima tahun ke depan dengan fokus pada peningkatan akses, mutu, relevansi, serta daya saing global perguruan tinggi melalui penguatan kurikulum dan pembelajaran, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan dosen, percepatan transformasi digital, serta penguatan riset, inovasi, dan hilirisasi teknologi. Renstra ini mendorong tata kelola yang bersih dan akuntabel, perluasan kerja sama internasional, peningkatan ekosistem sains-teknologi, serta pemerataan layanan pendidikan tinggi, sekaligus menegaskan peran unit-unit pelaksananya dalam memastikan implementasi kebijakan secara efektif dan berdampak menuju pencapaian Indonesia Emas 2045.	Menjadi kerangka utama perumusan sasaran LLDIKTI (Talenta, Inovasi, Kontribusi, Tata Kelola). Menegaskan peran LLDIKTI sebagai pembina PTS berbasis data, penguatan riset, integritas kampus, tata kelola, dan arsitektur PTS. Menjadi dasar penyusunan IKU/IKK LLDIKTI

Tabel 13 Kerangka Regulasi

3.3. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, LLDIKTI Wilayah V merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala LLDIKTI Wilayah V menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, direktur jenderal terkait, dan pimpinan satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja dengan LLDIKTI Wilayah V.

Adapun dalam melaksanakan tugas fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, LLDIKTI Wilayah V juga menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi;
2. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
3. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi;
4. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal;
5. pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi;
6. pelaksanaan fasilitasi pendirian perguruan tinggi dan pembentukan program studi;
7. pelaksanaan kerja sama;
8. pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi; dan
10. pelaksanaan administrasi.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, LLDIKTI V mempunyai struktur organisasi seperti yang tergambar pada gambar berikut:

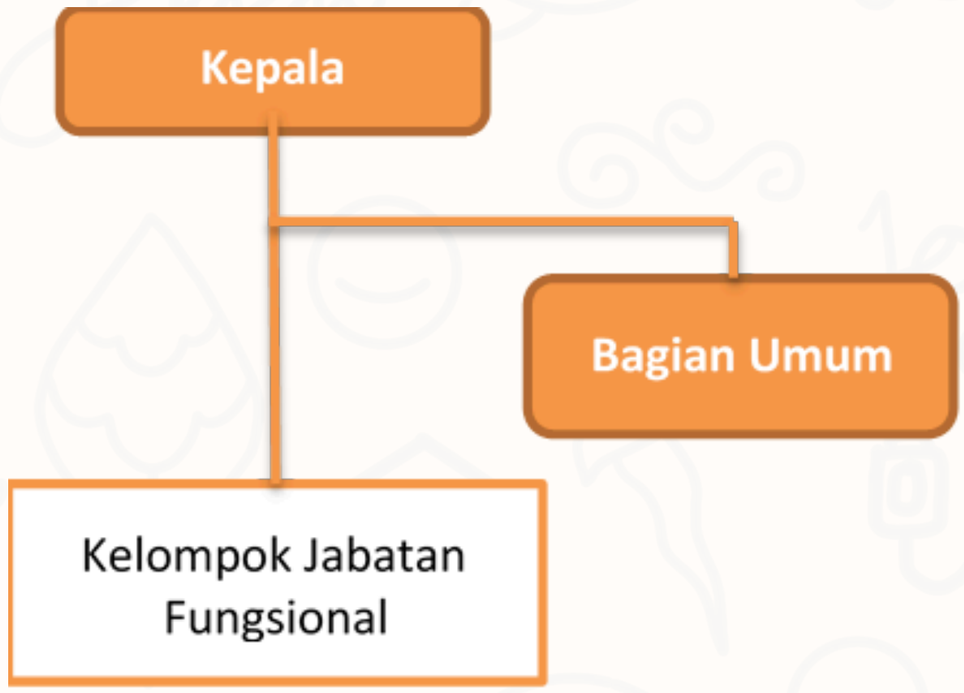

Gambar 3 Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditentukan, telah ditetapkan 3 (tiga) Target Kinerja Tujuan dan 8 (delapan) Target Kinerja Sasaran di lingkungan LLDIKTI Wilayah V pada tahun 2025-2029, sebagai berikut:

4.1.1 Target Kinerja Tujuan

No	Tujuan LLDIKTI Wilayah V	Indikator Tujuan LLDIKTI Wilayah V	Satuan	Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya tata kelola layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung birokrasi yang bersih dan melayani	Persentase Kepuasan Layanan	%	**71,7**	**75**	**80**	**81**	**82**
2	Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi yang bermutu	Jumlah Perguruan Tinggi Swasta Terakreditasi Unggul	PTS	**10**	**10**	**11**	**12**	**13**
		Progam Studi Terakreditasi Unggul	Prodi	**226**	**243**	**263**	**288**	**333**
		Jumlah prodi yang mendapatkan rekognisi internasional	Prodi	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
3	Meningkatnya kolaborasi dan kemitraan perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan	1. Jumlah PTS yang meningkat kerja sama tridharma dengan mitra pemangku kepentingan;	PTS	**10**	**10**	**15**	**20**	**25**
		2. Jumlah PTS yang meningkat kinerja penelitian dan pengabdian pada masyarakat	PTS	**52**	**19**	**25**	**30**	**35**

Tabel 14 Target Kinerja Tujuan LLDIKTI Wilayah V Tahun 2025 - 2029

4.1.2 Target Kinerja Sasaran

Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Tahun				
		lini dasar (2025)	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
Keunggulan Layanan	Skor	71,7	75	80	81	82
Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta	%	101	100	100	100	100
Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	Skor	85	90	90	90	90
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
Fasilitasi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta oleh LLDIKTI	%	55,5	100	100	100	100
Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan, Anti Narkoba, dan Anti Korupsi	%	55,3	95	96	97	98
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan						
Fasilitasi Pengembangan Kemahasiswaan dan Prestasi oleh LLDIKTI.	%	81	95	96	97	98
Jumlah Dosen PTS yang Meningkat Jabatan Fungsionalnya	orang	0	500	530	562	596
Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, dan Kemitraan PTS	%	0,8	0,68	0,29	0,28	0,27
Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
Nilai Kerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	99,88	99,89	99,90	99,91	99,92

Tabel 15 Target Kinerja Sasaran LLDIKTI Wilayah V Tahun 2025 - 2029

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan sumber pendanaan yang memadai. Berikut tabel kebutuhan pendanaan periode tahun 2025-2029, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1.489.744.800	1.655.272.000	1.820.799.200	2.002.879.120	2.203.167.032
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.	831.346.200	923.718.000	1.016.089.800	1.117.698.780	1.229.468.658
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	1.750.171.500	1.944.635.000	2.139.098.500	2.353.008.350	2.588.309.185
4	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI V	273.703.478.000	290.735.701.200	309.933.774.490	331.150.400.077	354.586.445.742
	Total	277.774.740.500	295.259.326.200	314.909.761.990	336.623.986.327	360.607.390.617

Tabel 16 Kerangka Pendanaan

BAB V – PENUTUP

Renstra LLDIKTI Wilayah V Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah V dalam rangka fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen Renstra juga menjadi komitmen bersama LLDIKTI Wilayah V menjadi institusi yang bersih dan melayani dalam mewujudkan pendidikan tinggi Yogyakarta yang unggul, kolaboratif, inklusif, adaptif, dan berdampak, sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan ditetapkannya Renstra LLDIKTI Wilayah V Tahun 2025–2029 ini, seluruh program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai wujud komitmen LLDIKTI Wilayah V dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan, serta memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Partisipasi aktif, kritik yang konstruktif, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra ini memberikan dampak nyata, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan pendidikan tinggi nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran/ Indikator	Lokasi	Satuan	Base line (2024)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Lembaga Layanan Pendidkan Tinggi Wilayah V															
Pendidikan Tinggi															
Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi															
	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)														
	Keunggulan Layanan	Yogyakarta	%		71,7	75	80	81	82						
	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapatkan Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu									565	628	690	759	835	
	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta	Yogyakarta	%		101	100	100	100	100						
	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapatkan Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu									395	439	483	531	584	

Program/Kegiatan	Sasaran/ Indikator	Lokasi	Satuan	Base line (2024)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapat Layanan Rekomendasi									40	44	48	54	59	
	Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas) LLDIKTI	Yogyakarta	Nilai		85	90	90	90	90						
	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapatkan Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu									490	544	599	659	724	
	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi														
	Fasilitasi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta oleh LLDIKTI	Yogyakarta	%		55,5	100	100	100	100						
	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapatkan Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu									716	795	875	963	1.059	
	Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan, Anti Narkoba, dan Anti Korupsi	Yogyakarta	%		55,3	95	96	97	98						
	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapatkan Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu									115	128	141	155	170	
	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan														
	Fasilitasi Pengembangan Kemahasiswaan dan Prestasi oleh LLDIKTI	Yogyakarta	%		81	95	96	97	98						

Program/ Kegiatan	Sasaran/ Indikator	Lokasi	Satuan	Base line (2024)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapatkan Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu									183	203	224	246	271	
	Jumlah Dosen PTS yang Meningkat Jabatan Fungsionalnya	Yogyakarta	Orang		0	500	530	562	596						
	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapatkan Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu									613	681	749	824	907	
	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, dan Kemitraan PTS	Yogyakarta	%		0,8	0,68	0,29	0,28	0,27						
	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapatkan Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu									954	1.060	1.166	1.283	1.411	
	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI V														
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Yogyakarta	Nilai		99,88	99,89	99,9	99,91	99,92						
	Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi									182.327	200.559	220.615	242.677	266.944	

Program/ Kegiatan	Sasaran/ Indikator	Lokasi	Satuan	Base line (2024)	Target					Alokasi (dalam juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Dukungan Manajemen															
Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi															
	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)														
	Keunggulan Layanan	Yogyakarta	%		71,7	75	80	81	82						
	Layanan Sarana Internal									358	398	438	482	530	
	Meningkatnya tata kelola LLDIKTI V														
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Yogyakarta	Nilai		99,88	99,89	99,9	99,91	99,92						
	Layanan Perkantoran									91.008	89.768	88.870	87.982	87.102	
	Layanan BMN									10	10	10	10	10	

Lampiran 2. Definisi Operasional

Program	Pendidikan Tinggi
SK 1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKK 1.1	Keunggulan layanan LLDIKTI
Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI. Kriteria layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori: a. layanan akademik (Contoh: penomoran ijazah dan sertifikat profesi nasional(PISN), akreditasi, penjaminan mutu); b. layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan; c. layanan terkait data dan informasi; dan/atau d. layanan kelembagaan (Contoh: pembukaan program studi baru, pendirian PTS baru, pindah lokasi, penyatuan dan penggabungan, dan penutupan).
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100\%$ n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan t = total responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan)
Satuan	Persentase
Tipe Penghitungan	Non Komulatif
Unit Pelaksana	Lembaga Layanan Penddikan Tinggi Wilayah V
Sumber Data	Laporan Internal LLDIKTI Wilayah V
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Triwulan

Program	Pendidikan Tinggi
SK 1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKK 1.2	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Definisi	Merupakan indikator yang mengukur persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu PTS dengan cara penyatuan dan/atau penggabungan PTS. Kriteria Untuk laporan dan evaluasi, LLDIKTI dapat menggunakan acuan skala sebagai berikut:

% Capaiaan	Kriteria	Keterangan
90-100	Sangat Baik	Hampir semua PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/ penggabungan sesuai target LLDIKTI.
75 - <90	Baik	Sebagian besar PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan /penggabungan
50 - <75	Cukup	Sebagian PTS terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan, masih perlu perbaikan.
25 - <50	Kurang	Hanya sebagian kecil PTS yang terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan.
<25	Sangat Kurang	Hampir semua PTS belum terakreditasi.

Metode Penghitungan	$\frac{a+b}{t} \times 100\%$ a = jumlah PTS yang terakreditasi. b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan. t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut
Satuan	Persentase
Tipe Penghitungan	Non Komulatif
Unit Pelaksana	Lembaga Layanan Penddikan Tinggi Wilayah V
Sumber Data	PD Dikti dan Laporan Internal LLDIKTI Wilayah V
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Triwulan

<table>
<tr><th>Program</th><th>Pendidikan Tinggi</th></tr>
<tr><td>SK 1</td><td>Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)</td></tr>
<tr><td>IKK 1.3</td><td>Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas</td></tr>
<tr><td>Definisi</td><td>Indikator ini mengukur pencapaian predikat kinerja akuntabilitas (SAKIP) serta pencapaian predikat Zona Integritas (WBK/WBBM) oleh LLDIKTI pada tahun penilaian, sebagaimana hasil evaluasi resmi dari KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek dengan memperhatikan indikator pendukung tata kelola berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Skala dan Predikat Penilaian SAKIP:
<table>
<tr><th>% Capaiaan</th><th>Kriteria</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>90-100</td><td>AA (Memuaskan)</td><td>Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan.</td></tr>
<tr><td>80 - 89</td><td>A (Sangat Baik)</td><td>Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target</td></tr>
<tr><td>70 - 79</td><td>BB (Baik)</td><td>Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan.</td></tr>
<tr><td>60 - 69</td><td>C (Cukup Baik)</td><td>Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten</td></tr>
<tr><td><60</td><td>CC-C (Kurang)</td><td>Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP.</td></tr>
</table>
Kriteria Zona Integritas (ZI):
Zona Integritas dianggap memenuhi indikator apabila LLDIKTI berpredikat:
a. WBBM (nilai tertinggi) = 100
b. WBK = 90
c. Menuju WBK = 80

Ketentuan
a. Predikat SAKIP dan ZI yang dinilai merupakan hasil penilaian resmi KemenPANRB pada tahun berjalan.
b. Predikat yang digunakan hanya yang diumumkan secara formal melalui laporan atau surat keputusan evaluasi KemenPANRB.
c. Indikator dapat berbentuk pencapaian predikat (A/B/BB/BBB/CC) atau status ZI (menuju WBK/WBK/WBBM).

Untuk output, predikat dinyatakan sah apabila terdapat bukti:
a. SK Penetapan KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek;
b. Laporan Evaluasi SAKIP; dan
c. pengumuman resmi hasil ZI KemenPANRB.</td></tr>
<tr><td>Metode Penghitungan</td><td>$$\frac{\text{Nilai Sakip + Nilai Zona Integritas}}{2}$$
Contoh perhitungan:
Diketahui Nilai SAKIP AA = 90, Nilai ZI WBK = 90
$$\frac{90 + 90}{2} = 90$$</td></tr>
<tr><td>Satuan</td><td>Nilai</td></tr>
<tr><td>Tipe Penghitungan</td><td>Non Komulatif</td></tr>
<tr><td>Unit Pelaksana</td><td>Lembaga Layanan Penddikan Tinggi Wilayah V</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Aplikasi SPEKTA, InspirasiDikti</td></tr>
<tr><td>Polarisasi Indikator</td><td>Maksimal</td></tr>
<tr><td>Periode Pengumpulan Data</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

Program	Pendidikan Tinggi
SK 2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKK 2.1	Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI
Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitasi peningkatan mutu kepada PTS pada bidang pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kriteria Kegiatan yang termasuk dalam lingkup fasilitasi peningkatan mutu PTS oleh LLDIKTI mencakup pendampingan, bimbingan teknis, asistensi, evaluasi, serta layanan konsultasi yang terdokumentasi secara resmi. Adapun PTS yang hanya menjadi peserta pasif webinar tanpa asistensi tidak dihitung sebagai fasilitasi peningkatan mutu. Ketentuan a. Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi. b. Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi. c. Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu dari LLDIKTI pada tahun berjalan (pembelajaran, SPMI, atau kombinasi di antaranya) t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut
Satuan	Persentase
Tipe Penghitungan	Komulatif
Unit Pelaksana	Lembaga Layanan Penddikan Tinggi Wilayah V
Sumber Data	Laporan Internal LLDIKTI Wilayah V
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Triwulan

Program	Pendidikan Tinggi
SK 2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
IKK 2.2	Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi
Definisi	Merupakan indikator yang mengukur persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi. Kriteria a. Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT), meliputi: 1. mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi, misalnya melalui platform Learning Management System atau opsi pengajaran lainnya; dan 2. membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan berupa: a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek PPKPT; c) melakukan sosialisasi terkait PPKPT; d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh; e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/atau f) memiliki peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi: 1. memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau 2. melakukan sosialisasi anti narkoba. c. Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi: 1. menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi; 2. memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi; 3. memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 4. mengimplementasikan Whistle Blowing System; dan/atau 5. memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (conflict of interest).
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut
Satuan	Persentase
Tipe Penghitungan	Komulatif
Unit Pelaksana	Lembaga Layanan Penddikan Tinggi Wilayah V
Sumber Data	Laporan Internal LLDIKTI Wilayah V
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Triwulan

Program	Pendidikan Tinggi
SK 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
IKK 3.1	Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI
Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada perguruan tinggi swasta (PTS) untuk peningkatan mutu layanan kemahasiswaan, termasuk pengembangan minat bakat, karier, dan prestasi mahasiswa. Kriteria Kegiatan yang termasuk fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI meliputi bimbingan teknis kemahasiswaan, pendampingan layanan karier, pembinaan minat, bakat, dan prestasi, penguatan organisasi mahasiswa, dan PPKPT. Adapun kegiatan webinar umum tidak dihitung. Ketentuan a. Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi. b. Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi. c. Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu layanan kemahasiswaan dari LLDIKTI pada tahun berjalan (workshop kemahasiswaan, pembinaan prestasi, pelayanan karier, PPKPT, minat bakat, atau pendampingan standar kemahasiswaan) t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut
Satuan	Persentase
Tipe Penghitungan	Komulatif
Unit Pelaksana	Lembaga Layanan Penddikan Tinggi Wilayah V
Sumber Data	Laporan Internal LLDIKTI Wilayah V
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Triwulan

Program	Pendidikan Tinggi
SK 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
IKK 3.2	Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya
Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengalami peningkatan jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, atau Profesor) setelah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI, seperti bimbingan teknis (bimtek) jabatan fungsional, klinik penyusunan angka kredit, pendampingan penyusunan portofolio dan dokumen kepakaran, konsultasi percepatan jabatan fungsional, serta program pembinaan SDM lainnya yang terkait dengan jabatan fungsional. Kriteria dosen yang dapat diperhitungkan dalam indikator ini yaitu: a. dosen harus berasal dari PTS di wilayah kerja LLDIKTI; b. mengikuti program pembinaan LLDIKTI (bimtek, pendampingan, dan sebagainya); c. tercatat dalam daftar peserta dan diverifikasi oleh LLDIKTI; d. mendapatkan keputusan kenaikan jabatan fungsional setelah program pembinaan; e. keputusan kenaikan jabatan fungsional diterbitkan pada tahun berjalan (tahun penilaian IKU); dan f. peningkatan jabatan fungsional merupakan hasil dari proses yang didampingi atau difasilitasi LLDIKTI. Ketentuan a. Dosen harus mengikuti kegiatan pembinaan resmi LLDIKTI (daftar hadir dan dokumentasi tersedia). b. Peningkatan jabatan fungsional harus dibuktikan dengan keputusan kenaikan jabatan fungsional yang diterbitkan pada tahun penilaian. c. Kenaikan jabatan fungsional dihitung untuk semua jenjang: 1. dari Asisten Ahli ke Lektor; 2. dari Lektor ke Lektor Kepala; dan 3. dari Lektor Kepala ke Profesor. d. Jika 1 (satu) dosen naik lebih dari 1 (satu) jenjang dalam tahun yang sama, hanya dihitung 1 (satu) kali.
Metode Penghitungan	*Jumlah Dosen PTS Naik Jabatan Fungsional*
Satuan	orang
Tipe Penghitungan	Komulatif
Unit Pelaksana	Lembaga Layanan Penddikan Tinggi Wilayah V
Sumber Data	Laporan Internal LLDIKTI Wilayah V
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Triwulan

Program	Pendidikan Tinggi
SK 3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
IKK 3.3	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kemitraan PTS
Definisi	Indikator ini mengukur jumlah PTS yang menerima fasilitasi LLDIKTI dalam rangka peningkatan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, atau kemitraan tridharma melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, atau klinik peningkatan mutu yang dilaksanakan pada tahun penilaian. Kriteria Kegiatan yang termasuk dalam fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, dan kemitraan PTS yaitu pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, klinik peningkatan mutu, coaching clinic, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, workshop HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, serta workshop penguatan kapasitas peneliti/dosen. Ketentuan: Fasilitasi penelitian dan publikasi PTS: a. PTS mengikuti fasilitasi resmi LLDIKTI (bimtek, coaching clinic, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, workshop HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan workshop penguatan kapasitas peneliti/dosen); b. kegiatan dilakukan pada tahun penilaian; dan c. terdapat bukti keikutsertaan atau dokumen resmi dari LLDIKTI (undangan, daftar hadir, sertifikat, laporan kegiatan, atau dokumentasi fasilitasi). Kriteria partisipasi PTS dalam fasilitasi LLDIKTI: a. mengikuti minimal satu kegiatan fasilitasi penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI; b. partisipasi diwakili oleh dosen tetap, bukan tenaga tidak tetap; c. ada output minimal, seperti: • proposal penelitian/kemitraan yang diverifikasi; • outline artikel yang dibina; dan • rencana aksi peningkatan kinerja penelitian atau kemitraan; dan d. PTS tercatat dalam daftar penerima fasilitasi resmi LLDIKTI wilayah.
Metode Penghitungan	$\frac{n}{t} \times 100\%$ n = jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI pada tahun penilaian t = total publikasi di seluruh PTS pada wilayah kerja LLDIKTI tersebut
Satuan	PTS
Tipe Penghitungan	Komulatif
Unit Pelaksana	Lembaga Layanan Penddikan Tinggi Wilayah V
Sumber Data	Laporan Internal LLDIKTI Wilayah V
Polarisasi Indikator	Minimal
Periode Pengumpulan Data	Triwulan

Program	Dukungan Manajemen
SK 4	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
IKK 4.1	Nilai Kerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L
Definisi	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian berdasarkan aspek penyerapan anggaran dan pencapaian target-target kinerja serta pengelolaan perbendaharaannya. Nilai Kinerja Anggaran ini berasal Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan terhadap Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran. Penilaian atas Perencanaan Anggaran dengan mengukur efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Sementara itu Penilaian atas Pelaksanaan Anggaran dengan mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan, perhitungan NKA ditentukan oleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan pembobotan masing-masing sebesar 50%.
Metode Penghitungan	Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini: NKA= (50%× Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran) + (50%× Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran diambil dari aplikasi eMonev DJA. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diambil dari 8 indikator pada aplikasi MyIntress.
Satuan	Nilai
Tipe Penghitungan	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Sumber Data	eMonevDJA, MyIntress
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahunan

Lamp 3 Pohon Kinerja

visi

vIsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V ditentukan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia serta Visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan mewujudkan: **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V yang bersih dan melayani dalam mewujudkan pendidikan tinggi Yogyakarta yang unggul, kolaboratif, inklusif, adaptif dan berdampak"**

misi

- Mewujudkan tata kelola layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung birokrasi yang bersih dan melayani
- Mewujudkan pemerataan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan
- Mewujudkan penguatan kolaborasi dan kemitraan perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan.

Tujuan

- Meningkatnya tata kelola layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung birokrasi yang bersih dan melayani
- Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi yang bermutu
- Meningkatnya kolaborasi dan kemitraan perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan

Sasaran Kegiatan

- Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
- Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
- Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.
- Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Indikator Kinerja

- IKU 1
- IKU 2
- IKU 3
- IKU 9
- IKU 4
- IKU 5
- IKU 6
- IKU 7
- IKU 8